



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

PEMBIMBING:

Drs. Dede Kuswanda, Ph.D

Oleh :

IVA FARADILLA FARHATUL ULYA

NRP. 20.03.031

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Iva Faradilla Farhatul Ulya

NRP : 20.03.031

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing:


Drs. Dede Kuswanda, Ph.D

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung




Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan secara luring.

Dalam proses penyusunan laporan, praktikan telah diberikan dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini praktikan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan demi kelancaran kegiatan praktikum.
3. Dra. Atirista Nainggolan, M.P. selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan arahan kepada praktikan dalam proses pelaksanaan praktikum laboratorium.
4. Drs. Dede Kuswanda, Ph. D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada praktikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium dan penyusunan laporan.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 10 yang senantiasa memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum laboratorium.
6. Pemerintah Kelurahan Cimincrang dan masyarakat Kelurahan Cimincrang yang telah menerima kehadiran dan memberikan ilmu dan pengalaman bagi praktikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.

Praktikan mengharapkan dengan adanya laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca. Praktikan menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu praktikan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dan semoga laporan ini berguna bagi praktikan dan bagi pihak pembaca.

Bandung, Februari 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR MATRIKS.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum Laboratorium	2
1.4 Peserta Praktikum.....	3
1.5 Lokasi dan Waktu Praktikum.....	3
1.6 Proses Praktikum.....	3
1.7 Sistematika Laporan	10
BAB II.....	11
PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	11
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial.....	11
2.1.1 Gambaran Umum Masalah	11
2.1.2 Tinjauan Konsep/Teori Yang Relevan Dengan Masalah	12
2.1.3 Asesmen.....	14
2.1.4 Rencana Intervensi.....	16
2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	24
2.2.1 Gambaran Umum Masalah	24
2.2.2 Tinjauan Konsep/Teori Yang Relevan Dengan Masalah	25
2.2.3 Assesmen	26
2.2.4 Rencana Intervensi.....	27
2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	35
2.3.1 Gambaran Umum Masalah	35
2.3.2 Tinjauan Konsep	35
2.3.3 Asesmen.....	43
2.3.4 Rencana Intervensi.....	47
2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Hidup.....	54

2.4.1	Gambaran Umum Masalah	54
2.4.2	Tinjauan Konsep	55
2.4.3	Asesmen.....	59
2.4.4	Rencana Intervensi.....	63
2.5	Profil Analisis Penanggulangan Bencana	70
2.5.1	Gambaran Umum Masalah	70
2.5.2	Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah	70
2.5.3	Asesmen.....	73
2.5.4	Rencana Intervensi.....	75
BAB III.....		81
KESIMPULAN.....		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
Daftar Lampiran Dokumentasi Praktikum Laboratorium		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Anggaran Biaya Analisis Jaminan Sosial	21
Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	32
Tabel 2.3 Rencana Anggaran Biaya Analisis Pemberdayaan Sosial	51
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Biaya Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	66
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Biaya Analisis Penanggulangan Bencana Sosial	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial	15
Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial	26
Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial.....	45
Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan Sosial	60
Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana Sosial	74

DAFTAR MATRIKS

Matriks 2.1 Rencana Bentuk Kegiatan Program Analisis Jaminan Sosial	17
Matriks 2.2 Sistem Partisipan Program Analisis Jaminan Sosial	18
Matriks 2.3 Jadwal Kegiatan Program Analisis Jaminan Sosial.....	19
Matriks 2.4 Analisis Swot Analisis Jaminan Sosial	22
Matriks 2.5 Bentuk Kegiatan Program Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	28
Matriks 2.6 Sistem Partisipan Program Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	29
Matriks 2.7 Jadwal Kegiatan Program Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	30
Matriks 2.8 Analisis Swot Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	33
Matriks 2.10 Analisis SWOT Program Analisis Pemberdayaan Sosial	52
Matriks 2.11 Sistem Partisipan Program Analisis Penataan Lingkungan Sosial....	65
Matriks 2.12 Analisis SWOT Program Analisis Penataan Lingkungan Sosial	67
Matriks 2.13 Bentuk Kegiatan Analisis Penanggulangan Bencana Sosial.....	77
Matriks 2.14 Sistem Partisipan program Penanggulangan Bencana Sosial	77
Matriks 2.15 Alat Program Analisis Penanggulangan Bencana Sosial	78
Matriks 2.16 Analisis SWOT Program Penanggulangan Bencana Sosial	79
Matriks 2.17 Jadwal Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Sosial.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (classroom teaching), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (laboratory practicum) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

1.1. Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang

- keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a. Pendekatan Awal
 - b. Assesemen
 - c. Perencanaan Intervensi

1.3 Manfaat Praktikum Laboratorium

A. Bagi Mahasiswa :

- 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :

- a. Pendekatan Awal
- b. Asesmen
- c. Rencana Intervensi

B. Bagi Lembaga

- 1) Meningkatkan kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.4 Peserta Praktikum

Peserta Praktikum Laboratorium adalah mahasiswa Semester VI Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang telah mengontrak mata kuliah Praktikum Laboratorium dengan jumlah peserta praktikum sebanyak 82 orang yang terbagi kedalam 10 kelompok.

1.5 Lokasi dan Waktu Praktikum

Lokasi praktikum di desa atau kelurahan tempat tinggal masing-masing praktikan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- 1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari – 03 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 03 Februari 2023
- 2. Lapangan (Indoor) : 06 Februari – 15 April 2023
- 3. Pasca Lapangan :
 - a) Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
 - b) Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
 - c) Ujian Lisan Praktikum : 1-2 Mei 2023
 - d) Perbaikan dan penyerahan Laporan: 03 – 10 Mei 2023

1.6 Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:
 - 1. Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom.
 - 2. Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan.

3. Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal:
 - a) Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
 - b) Mengidentifikasi dan memahami program-program: Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana.
 - c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - e) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

b. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum Serah terima praktikan, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media zoom meeting dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

1.6.2 Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

- b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial
 - 1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial.
 - b) Model jaminan sosial yang digunakan.
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial.
 - d) Merancang program jaminan sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial
 - f) Stakeholder terkait program jaminan sosial.
 - 2) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan:

- (1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
 - (2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
 - (3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
 - (4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial
- b) Keterampilan:
- (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial.
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.
- c. Praktik Analisis Jaminan Sosial, meliputi:
- (a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.
 - (b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 - (c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 - (d) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial.
- d. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
 - b) Model sumber dana bantuan sosial, yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
 - d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
 - f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial.
 - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - (1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya

- (2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
 - (3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - (4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - (5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - (6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
- b) Keterampilan
- (1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - (2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - (5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial
- 3) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi:
- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - c) Menyusun Rencana Intervensi
 - d) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial
- e. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi / industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial,
 - b) Model pemberdayaan sosial yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial,
 - d) Merancang program Pemberdayaan Sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial
 - f) Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial

- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 1. Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
 2. Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
 3. Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
 4. Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
 5. Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
 6. Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.
 - b) Keterampilan
 - (1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
 - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
 - (5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
 - (6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
 - (7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
 - (8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
 - (9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
 - (10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial
- 3) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi:
 - 1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
 - 2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - 3) Menyusun Rencana Intervensi
 - 4) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

- f. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
 - b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
 - d) Merancang program penataan lingkungan sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
 - f) Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial
 - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - (1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
 - (2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
 - (3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
 - (4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
 - (5) Menguasai Konsep interaksisosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
 - (6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - (7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
 - b) Keterampilan
 - (1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
 - 3) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi:
 - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
 - b) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
 - c) Menyusun Rencana Intervensi
 - d) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- g. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana
- 1) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
 - b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
 - d) Merancang program penanggulangan bencana
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
 - f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana
 - 2) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - (1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
 - (2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
 - (3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
 - (4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
 - (5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
 - b) Keterampilan
 - (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
 - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
 - (3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
 - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
 - (5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
 - 3) Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi:
 - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
 - b) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder

- c) Menyusun Rencana Intervensi
- d) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika dalam laporan ini, tersusun atas:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, sasaran kegiatan praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan.

BAB II KAJIAN LITERATUR, yang berisi tentang Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, dan rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, yang berisi kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditujukan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut undang-undang No 40 tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan menurut Spicker (1995:58-60) jaminan sosial adalah suatu bentuk investasi sosial yang memberi untuk dalam jangka panjang yang berlandaskan dua pilar utama, yaitu redistribusipendapatan dan solidaritas sosial.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Septiandika, 2017). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Rohaeni & Saryono, 2018) bahwa kebijakan PIP melalui KIP yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah wewenang Kementerian dan Kebudayaan bertujuan untuk menyediakan bantuan terkhusus untuk siswa miskin sehingga dapat melanjutkan sekolahnya, dengan demikian sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mencegah anak putus sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan peran setiap sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan PIP melalui KIP secara operasional dengan baik agar PIP ini tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Namun, dalam hal ini masih banyak peserta didik yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya pendidikan sekolah. Selain itu, masih adanya peserta didik yang tergolong tidak mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, serta peserta didik yang sudah menerima KIP pun masih juga kesulitan membayar biaya sekolah dan kesulitan memenuhi perlengkapan kebutuhan sekolahnya.

Dalam pemerataan pendidikan, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah, juga pentingnya secara sistematis dan konsisten peran sekolah melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat tujuan PIP yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

2.1.2 Tinjauan Konsep/Teori Yang Relevan Dengan Masalah

a. Konsep Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah singkatan dari **Program Indonesia Pintar**. Ini adalah program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Bantuan atau Program Indonesia Pintar ini memang diberikan ke siswa atau peserta didik yang kurang mampu dalam bentuk uang tunai, kesempatan belajar, akses-akses yang diperlukan dan lainnya. Dalam hal ini, tidak semua siswa mendapatkan bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar ini.

Tujuan pemerintah dalam membentuk program yang satu ini atau memberikan bantuan ke pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini adalah supaya nantinya pendidikan di Indonesia ini bisa merata. Selain itu juga, pemerintah berharap bisa mengentaskan kemiskinan anak bangsa. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan seperti Program Indonesia Pintar atau PIP ini tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti sekolah formal, ya. Karena ya itu, tadi bantuannya akan diberikan merata dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

b. Dasar Hukum Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

Rincian tentang sasaran dari PIP yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

1. Siswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin dan dengan pertimbangan khusus yang seperti ada di bawah ini.
2. Siswa yang terkena bencana alam dan dampaknya.
3. Siswa yang sudah tidak bersekolah lagi dan diharapkan nantinya bisa kembali masuk ke sekolah.
4. Peserta didik yang mengalami musibah seperti orang tua yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berasal dari keluarga

yang terpidana, korban musibah, memiliki kelainan fisik, memiliki lebih dari tiga bersaudara yang tinggal di satu rumah.

5. Asalnya dari keluarga yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera.
6. Status dari peserta didik adalah yatim piatu/ yatim/ piatu atau asalnya dari panti asuhan atau panti sosial.
7. Siswa yang memang berasal dari keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan.
8. Peserta didik atau siswa memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar).Siswa yang berasal dari lembaga pendidikan non formal seperti kursus atau lainnya.

d. Besaran Bantuan PIP

Besaran yang akan bisa didapatkan dari bantuan PIP berdasarkan jenjang sekolah yang ditempuh.

1. Untuk jenjang SD/ Sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per semester.
2. Untuk jenjang SMP/ Sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per semester.
3. Di jenjang SMA/SMK/ Sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000 per semester.

e. Tujuan dari bantuan sosial PIP

a) Tujuan PIP bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;

b) Tujuan PIP bagi pendidikan tinggi:

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau

4. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi.
- f. Tata cara pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP)
 1. Jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki KKS dan mengajukannya kepada satuan pendidikan.
 2. Jika tidak memiliki KKS, orang tua siswa harus meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW, kelurahan, atau desa.
 3. Kemudian ajukan KKS milik orang tua siswa untuk verifikasi data

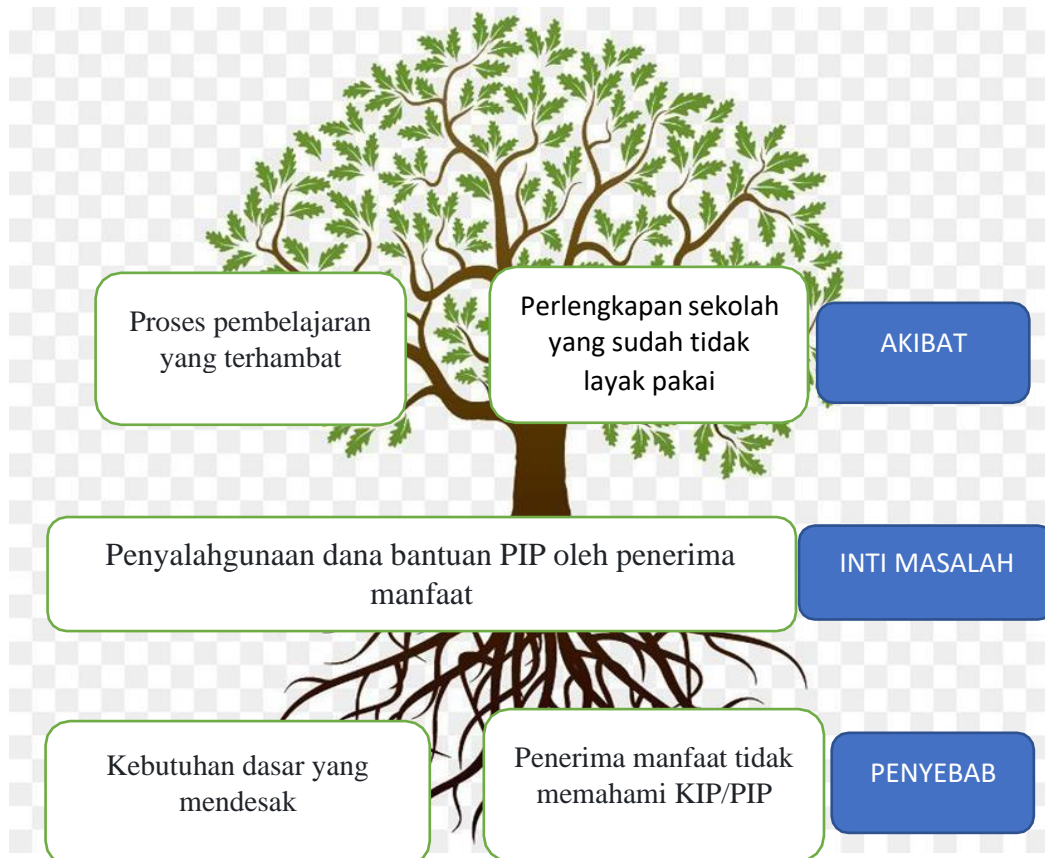
2.1.3 Asesmen

Cukup dari klien dan orang lain yang ada di lingkungan klien Asesmen merupakan rentang yang luas dan termasuk penilaian mengenai potensi, kebutuhan dan jaringan sosial klien yang menentukan cakupan dan beratnya masalah. Dalam sebuah proses perubahan terencana, focus pekerja sosial yang amat penting adalah mengumpulkan informasi yang. Pengumpulan data merupakan aktivitas memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya untuk memahami situasi-situasi klien, yang menjadi syarat dalam merancang rencana pemecahan masalah klien.

2. Identifikasi Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Masalah merupakan sesuatu yang harus diatasi dan dicarikan solusi penanganannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2009:52) masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Melalui penelusuran berita (DivaRedaksi24.com: 7 januari 2020) praktikan menemukan permasalahan. Adapun masalah PIP yang dihadapi masyarakat di cimincrang dijabarkan melalui analisis pohon masalah.

Praktikan menyajikan *tools* analisis pohon masalah untuk memudahkan dalam proses analisis asesmen. Silverman dan Silverman (1994) menggunakan istilah pohon masalah untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat dari adanya suatu permasalahan. Adapun rincian dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2 1 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial

a) Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu Penyalahgunaan dana bantuan PIP oleh keluarga penerima manfaat.

b) Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut :

a) Kebutuhan dasar yang mendesak

Jadi peserta didik penerima PIP dalam penggunaan dana bantuan PIP terkadang di gunakan untuk keperluan yang tidak sesuai pada yang harusnya di gunakan untuk keperluan sekolah yang ada bantuan dana tersebut digunakan untuk keperluan dapur, membenahi rumah, dan lainnya.

2) KPM tidak memahami aturan PIP

Jadi penerima bantuan dana PIP belum mengetahui secara detail terkait penggunaan bantuan dana PIP

c) Dampak Masalah

- 1) Perlengkapan sekolah yang sudah tidak layak pakai
- 2) Proses pembelajaran yang terhambat

3. Identifikasi Kebutuhan
 1. Kebutuhan akan meningkatkan pengetahuan atau pemahaman KPM terkait Program Indonesia Pintar (PIP)
 2. Memberikan pemahaman terhadap KPM PIP tentang komponen-komponen PIP
 3. Memberikan atau mengsosialisasikan kepada orangtua peserta penerima PIP agar tidak salah langkah dalam penggunaan dana bantuan PIP
 4. Pentingnya mengecek KPM PIP apakah dana bantuan tersebut digunakan semestinya yang terkait pada komponen-komponen PIP
4. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut Potensi dan Sumber di Cimincrang RW 02 :

 - a. Dinas Sosial Bandung

Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator dan support system pelaksanaan kegiatan tersebut dalam pelaksanaan program intervensi.
 - b. Koordinator Orangtua Penerima Bantuan PIP

Koordinator orangtua penerima bantuan PIP yang melaksanakan rencana intervensi akan bertindak sebagai educator jika koordinator mengalami kendala selama pelaksanaan dan menjadi perantara antara pihak sekolah atau pihak sekolah dengan Kemendikbud.

2.1.4 Rencana Intervensi

1. Latar Belakang

Menjadi tanggung jawab seluruh SDM Indonesia Pintar untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Indonesia Pintar. Secara khusus, personel yang paling dekat dengan keluarga penerima manfaat PIP dalam SDM Program Indonesia Pintar adalah Pihak Sekolah dan Ketua Tim PIP.

Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan dana Salah satu kebijakan untuk membantu biaya personal Pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat.

Dalam kebijakan PIP, salah satu kebijakan jaminan social dibidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin.
2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
 - a) Tujuan umum

Tujuan umum dari permasalahan program PIP di Kelurahan Cimincrang, yaitu untuk meningkatkan Pemahaman masyarakat mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).

- b) Tujuan khusus
- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
 - 2) Meningkatkan kesadaran tentang penggunaan dana bantuan PIP
 - 3) Berkurangnya keluhan terkait bantuan program PIP
3. Bentuk Kegiatan dan Program
- Berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan diadakan sosialisasi dan edukasi. Maka program yang akan di laksanakan adalah “Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Program Indonesia Pintar di Cimincrang” Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga untuk melaksanakan mekanisme aturan dan juga terkait; yang pertama, tujuan dan pelaksanaan program PIP. Kedua, pemahaman KPM tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Matriks 2 1 Rencana Bentuk Kegiatan Program “Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Program Indonesia Pintar”

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan	Sumber Biaya
Sosialisasi Terkait Pengenalan Program Indonesia Pintar agar warga penerima KPM paham dengan Program tersebut	Warga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)	Meningkatnya pengetahuan warga penerima bantuan PIP terkait penggunaan dana bantuan dan program PIP	Pihak Sekolah/Tim PIP	Bapak Lurah Kelurahan Cimincrang	2 hari	Pemerintah Cimincrang

4. Sistem Partisipan

Matriks 2.2 Sistem Partisipan Program “Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Program Indonesia Pintar”

No	Jenis Sistem	Sistem Respresentatif
1	Initiator System	Pihak Sekolah/Tim PIP
2	Change Agent System	Pihak Sekolah/Tim PIP
3	Client System	1. Warga Penerima PIP 2. Ketua Kelompok PIP
4	Support System	1. Dinas Sosial Bandung 2. Koordinator Orangtua Penerima PIP
5	Controlling System	Dinas Sosial Bandung
6	Implementing System	1. Pihak Sekolah/Tim PIP 2. Koordinator Orangtua Penerima PIP 3. Dinas Sosial Bandung 4. Ketua Kelompok PIP
7	Target System	1. KPM PIP 2. Ketua Kelompok PIP
8	Monitoring System	1. Pihak Sekolah/Tim PIP 2. Koordinator Orangtua Penerima PIP

5. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-langkah Pelaksanaan

a) Pra Pelaksanaan

1. Dalam Sosialisasi dan Edukasi terkait program Indonesia pintar (PIP) yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Pihak Sekolah/Tim PIP Program Indonesia Pintar Cimincrang, Ketua Kelompok Program Indonesia Pintar, dan Orangtua Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar.
2. Terdapat dua materi yang akan dibawakan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, yaitu pertama terkait Program Indonesia Pintar (PIP) serta hak dan kewajiban penerima bantuan PIP, materi kedua yaitu terkait tata cara pencairan dana bantuan PIP.
3. Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Koordinator Pihak Sekolah/Tim PIP
4. Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini bertempat di Aula Kantor Kelurahan Cimincrang.

b) Pelaksanaan

- a. Sambutan oleh Kepala Desa / Bapak Lurah
- b. Pembacaan Doa Oleh Pekerja Sosial
- c. Pemberian materi tentang Program Indonesia Pintar (PIP) serta Hak dan Kewajiban KPM

- d. Ice Breaking
- e. Pemberian materi tata cara pencairan dana bantuan
- f. FGD
- g. Penutup
- c) Pasca Pelaksanaan
 - a. Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial
 - b. Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan
 - c. Monitoring dan Evaluasi
 - d. Jadwal Kegiatan
- 2) Jadwal Kegiatan
Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan program;

Matriks 2 3 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Keterangan
1	09.45-10.15	Pembukaan	Sesi Acara	Pembukaan oleh Kepala Sekolah/Tim PIP dan Doa
2	10.15-11.45	Pemberian Materi 1	Sesi Acara	Materi : Program Indonesia Pintar serta Hak dan Kewajiban KPM Pemateri : Koordinator Penerima Manfaat PIP
3	11.45-12.45	Isoma	Sesi Konsumsi	Istirahat, Sholat Dzuhur, Makan Siang
4	12.45-13.00	Ice Breaking	Sesi Acara	Ice Breaking
5	13.00-14.30	Pemberian Materi 2	Sesi Acara	Materi : Tata cara pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pemateri : Pihak Sekolah/Tim PIP
6	14.30-15.30	Focus Group Discussion	Sesi Acara	Moderator : Pekerja Sosial
7	15.30-15.45	Tanya Jawab dan Penutup	Sesi Acara	Sesi ini di lakukan Oleh Koordinator Penerima Manfaat, Tim PIP Penutup Dilakukan Oleh Kepala Sekolah/Tim PIP

6. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program ini adalah:

- a. Sasaran mampu memahami Program Indonesia Pintar.
- b. Tujuannya adalah untuk memahami tanggung jawab dan hak-hak keluarga yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab pemimpin program Indonesia pintar.
- d. Koordinator Tim PIP untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

7. Metode dan Tehnik

Praktikan menggunakan metode community development (CO)/pengembangan organisasi (Community Organization/CD) dalam proses intervensi permasalahan masyarakat. Community Development (CO)/Pengembangan Organisasi (Community Organization/CD) adalah proses menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam komunitas atau bidang kegiatan tertentu. Beberapa teknik yang digunakan oleh praktisi meliputi:

a. Promosi Sosial

Penyuluhan sosial adalah proses perubahan tingkah laku melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan pendidikan kepada kelompok sasaran oleh pendidik sosial secara lisan, tertulis dan dengan demonstrasi, agar memiliki pemahaman, pengetahuan dan kemauan yang sama untuk berpartisipasi aktif membangun kesejahteraan sosial. dan datang

b. Diskusi Kelompok Fokus atau Focus Group Discussion

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang yang membahas secara mendalam sesuatu yang bersifat tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami masalah tertentu secara lebih rinci. Tujuan dari metode itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi tentang suatu masalah yang bersifat lokal dan spesifik.

c. Pemantauan dan evaluasi

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan. Asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan masyarakat sebagai akibat dari kegiatan yang teridentifikasi. Evaluasi berlangsung selama kegiatan dan pada akhir proyek. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik tentang kebutuhan program yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara program dan tujuan.

8. Rencana Anggaran Biaya

Program Penyuluhan Sosial Dapat terlaksana dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2 1 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	150.000,00	150.000,00
	Layar Proyektor	1	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jumlah I				950.000,00
2.	Honorarium				
	Koordinator Tim PIP	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
	Penerima Manfaat PIP	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah II				4.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				500.000,00
	Jumlah Keseluruhan				5.450.000,00

9. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Matriks 2 4 Analisis Swot

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strength :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Narasumber yang tepat 2. Kegiatan didukung oleh Pemerintah Daerah 3. KPM terbuka dengan informasi baru 4. KPM mempunyai <i>curiosity</i> yang besar 	<p>Weakness :</p> <p>Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan</p>
<p>Opportunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menambah pengetahuan KPM PIP mengenai pelaksanaan PIP 2. Pihak-pihak yang terkait dapat lebih memahami tugas dan kewajibannya 3. Meningkatkan Kesadaran Bagaimana cara menggunakan dana bantuan dengan sesuai kriteria komponen PIP 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan pengetahuan KPM 3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan PIP 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi sosialisasi dikemas secara menarik dan menggunakan komunikasi dua arah 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan diselingi penggunaan bahasa sunda
<p>Threats :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit menemukan waktu yang tepat 2. Rendahnya minat baca 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sejak jauh hari 2. Membuat pamflet atau poster dengan kalimat sederhana dan desain yang menarik 	<p>Strategi WT :</p> <p>Membuat acara yang efektif dan efisien</p>

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Sosialisasi dan Edukasi bagi Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Terlihat bahwa penerima manfaat PIP terbuka terhadap informasi baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemberian sosialisasi yang tepat akan meningkatkan tingkat kehati-hatian KPM PIP dalam pelaksanaannya ke depan.

Kegiatan ini kemudian juga didukung oleh pemerintah Kota Bandung melalui dinas sosial dan pemerintah kelurahan Cimincrang. Instansi terkait berperan dalam mengedukasi KPM PIP tentang hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan persoalan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan dana bansos PIP. Terlihat bahwa penerima manfaat PIP terbuka terhadap informasi baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemberian sosialisasi yang tepat akan meningkatkan tingkat kehati-hatian KPM PIP dalam pelaksanaannya ke depan.

Kegiatan ini kemudian juga didukung oleh pemerintah Kota Bandung melalui dinas sosial dan pemerintah Kelurahan Cimincrang. Instansi terkait berperan dalam mengedukasi KPM PIP tentang hak dan kewajibannya. Tujuannya agar kejadian Penyalahgunaan dana bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tidak terulang lagi.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu, adanya kemungkinan peserta yang merupakan KPM PIP tidak memahami materi yang disampaikan. Dengan pertimbangan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Sosialisasi dan Edukasi terkait bantuan PIP layak dilaksanakan.

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang maupun uang tunai. Ketentuan mengenai Bansos di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki masalah kemiskinan hingga saat ini. Masalah kemiskinan di Indonesia semakin besar ketika terjadinya gejolak perekonomian yang disebabkan oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga berdampak munculnya krisis ekonomi terparah di tahun 1998 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi turun dari 7 persen menjadi 13 persen (Bappenas, 2003). Sejak krisis itu, Indonesia dilanda masalah kemiskinan terparah sepanjang kehidupan. Meskipun hingga tahun 2019 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terhadap angka kemiskinan, namun masih menjadi masalah utama Indonesia terutama dalam pembangunan.

Pada tahun 2020, Kementerian Sosial RI memfokuskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada empat kebijakan yakni Pencegahan Stunting, KPM Graduasi Berdikari Sejahtera, Validasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) dan Sinergi dengan Program Keluarga Berencana (KB). Dari keempat fokus tersebut dapat diketahui bahwa PKH merupakan bagian dari program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional (Lestari, 2012, p. 129). Adapun sasaran utama dari implementasi Program PKH dibagi ke dalam lima kategori, yakni ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, kaum disabilitas berat, dan warga lansia (Media Indonesia, 2020).

Program keluarga harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan berbagai syarat. Program ini dilakukan dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH telah memberikan manfaat bagi penerima, namun pada implementasinya di berbagai daerah, program ini tidak selalu berjalan dengan baik. Dari sisi penerima manfaat, masalah yang sering terjadi adalah penyalahgunaan bantuan yang diberikan.

Di Kelurahan Cimincrang, Program Keluarga Harapan ini sudah di laksanakan sejak tahun 2016 Dengan total penerima 145 penerima PKH. Meskipun PKH telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima, namun pada implementasinya , program ini tidak selalu berjalan dengan baik di Kelurahan Cimincrang terutama yang berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Dari sisi penyaluran masih ditemukan masalah-masalah seperti data penerima yang tidak akurat,

bantuan yang terhenti, tidak sinkronnya data penerima dan masalah yang sering terjadi yaitu terkait penyalahgunaan bantuan yang di berikan.

2.2.2 Tinjauan Konsep/Teori Yang Relevan Dengan Masalah

A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

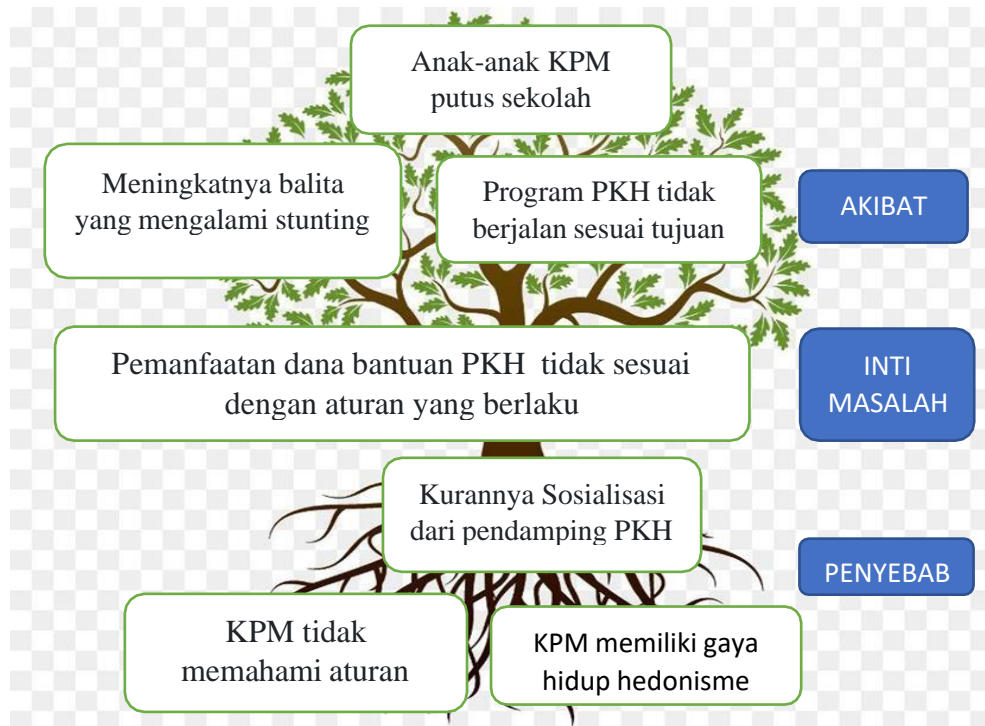
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah

2.2.3 Asesmen

a) Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu Pemanfaatan dana bantuan PKH tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

1) Anak-anak KPM putus sekolah.

Jadi keluarga penerima PKH dalam penggunaan dana bantuan PKH di gunakan untuk keperluan lain seperti skincare, membenahi rumah, membeli baju, dan yang lainnya

2) Kurangnya peran dari pendampig PKH.

Pemahaman tentang program keluarga harapan (PKH) dari masyarakat sangat kurang sehingga masyarakat berpikiran bahwa itu adalah bantuan yang di peruntukan kebutuhan-kebtuhan lain.

3) KPM tidak memahami aturan PKH

Jadi penerima PKH belum tau secara detail terkait dalam ke tiga kriteria komponen seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.

c) Dampak Masalah

- 1) Meningkatnya balita yang mengalami stunting
- 2) Program PKH tidak berjalan sesuai tujuan
- 3) Anak-anak KPM putus sekolah

- d) Identifikasi Kebutuhan
 - 1) Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan atau pemahaman KPM terkait program keluarga harapan (PKH).
 - 2) Memberikan pemahaman terhadap KPM PKH tentang komponen-komponen PKH
 - 3) Memberikan atau mensosialisasi kepada pendamping PKH agar KPM tidak salah langkah dalam penggunaan dana bantuan PKH
 - 4) Pentingnya mengecek KPM PKH apakah dana bantuan tersebut sudah digunakan semestinya yang terkait pada komponen-komponen PKH

e) Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Cimincrang;

- 1) Dinas Sosial Kota Bandung
Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator dan support system pelaksanaan kegiatan tersebut dalam pelaksanaan program intervensi.
- 2) Koordinator Kecamatan PKH
Koordinator kabupaten yang melaksanakan rencana intervensi akan bertindak sebagai edukator jika koordinator menemui kendala selama pelaksanaan dan menjadi perantara antara Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial dengan pendamping PKH.
- 3) Pendamping PKH
Fasilitator pelaksanaan program intervensi PKH, sebagai pendidik KPM PKH pelaksanaan PKH.

2.2.4 Rencana Intervensi

1. Latar Belakang

Menjadi tanggung jawab seluruh SDM Keluarga Harapan untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Keluarga Harapan. Secara khusus, personel yang paling dekat dengan keluarga penerima manfaat PKH dalam SDM program Harapan Manusia adalah pendamping PKH dan Ketua Tim PKH.

Salah satu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu memberikan bantuan dana pengentasan kemiskinan bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga Sangat membutuhkan yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai peserta (RTSM) PKH dari pemerintah. Untuk mendapatkan bantuan, diperlukan kepesertaan PKH Memenuhi tuntutan dan komitmen yang telah dimasukkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dalam kebijakan PKH, setiap anggota RTSM wajib menyekolahkan anaknya minimal sampai pada jenjang sekolah menengah pertama dan di bidang kesehatan, anggota RTSM yang memiliki anggota keluarga yang sedang hamil maka wajib memeriksakan kehamilannya secara rutin ke puskesmas (Peraturan Menteri Sosial no 1 tahun 2018).

2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

- 1) Tujuan umum

Tujuan umum dari permasalahan program PKH di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage yaitu untuk meningkatkan Pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Tujuan khusus

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga harapan (PKH)
- b) Meningkatkan kesadaran tentang penggunaan dana bantuan PKH
- c) Berkurangnya keluhan masyarakat terkait bantuan program PKH.

3. Bentuk Kegiatan dan Program

Berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan diadakan sosialisasi dan edukasi. Maka program yang akan di laksanakan adalah “Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cimincrang” Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga untuk melaksanakan mekanisme aturan dan juga terkait; yang pertama, tujuan dan pelaksanaan program PKH. Kedua, pemahaman KPM tentang program keluarga harapan (PKH).

Matriks 2 5 Bentuk Kegiatan Program “Peningkatan Pemahaman KPM tentang komponen Program Keluarga Harapan”

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan	Sumber Biaya
1. Sosialisasi Terkait Pengenalan Program Keluarga Harapan agar warga penerima KPM paham dengan Program tersebut 2. Pemahaman terkait kriteria komponen PKH	Warga Penerima program keluarga harapan (PKH)	Meningkatnya pengetahuan warga penerima bantuan PKH terkait penggunaan dana bantuan dan program PKH	Pendamping PKH	Bapak Lurah Cimincrang	1 hari	Kelurahan Cimincrang

4. Sistem Partisipan

Matriks 2 6 Sistem Partisipan Program “Peningkatan Pemahaman Terkait Program Keluarga Harapan”

No	Jenis Sistem	Sistem Respresentatif
1	Initiator System	Pendamping PKH
2	Change Agent System	Pendamping PKH
3	Client System	Warga Penerima PKH Ketua Kelompok PKH
4	Support System	Dinas Sosial Bandung Koordinator Kota Bandung
5	Controlling System	Dinas Sosial Bandung
6	Implementing System	Pendamping PKH Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Bandung Ketua Kelompok PKH
7	Target System	KPM PKH Ketua Kelompok PKH
8	Action System	Pendamping PKH Koordinator Kota PKH

e. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-langkah Pelaksanaan

a) Pra Pelaksanaan

Dalam Sosialisasi dan Edukasi terkait program keluarga harapan (PKH) yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Dinas Sosial Kota Bandung, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Cimincrang, Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan, dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Terdapat dua materi yang akan dibawakan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, yaitu pertama terkait Program Keluarga Harapan (PKH) serta hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat, materi kedua yaitu terkait tata cara pencairan dana bantuan PKH. Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Koordinator Kabupaten PKH Bandung Pra Pelaksanaan. Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini bertempat di Aula Kantor Kelurahan Cimncrang

b) Pelaksanaan

(1) Sambutan oleh Bapak Lurah Cimincrang

(2) Pembacaan Doa Oleh Pekerja Sosial

(3) Pemberian materi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta Hak dan Kewajiban KPM

(4) Ice Breaking

(5) Pemberian materi tata cara pencairan dana bantuan

(6) FGD

(7) Penutup

- c) Pasca Pelaksanaan
- (1) Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial
 - (2) Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan
 - (3) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Jadwal Kegiatan
- Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan program;

Matriks 2 7 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Keterangan
1	09.45-10.15	Pembukaan	Sesi Acara	Pembukaan oleh Bapak Lurah Cimincrang dan Doa
2	10.15-11.45	Pemberian Materi 1	Sesi Acara	Materi : Program Keluarga Harapan serta Hak dan Kewajiban KPM Pemateri : Koordinator Kota PKH Bandung
3	11.45-12.45	Isoma	Sesi Konsumsi	Istirahat, Sholat Dzuhur, Makan Siang
4	12.45-13.00	Ice Breaking	Sesi Acara	Ice Breaking
5	13,00-14.30	Pemberian Materi 2	Sesi Acara	Materi : Tata cara pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemateri : Pendamping PKH Kelurahan Cimincrang
6	14.30-15.30	Focus Group Discussion	Sesi Acara	Moderator : Pekerja Sosial
7	15.30-15.45	Tanya Jawab dan Penutup	Sesi Acara	Sesi ini di lakukan Oleh Koordinator PKH Kota Bandung Dan Penutup Dilakukan Oleh Bapak lurah Cimincrang

f. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program ini adalah:

- (1) Sasaran mampu memahami rencana keluarga harapan.
- (2) Tujuannya adalah untuk memahami tanggung jawab dan hak-hak keluarga yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.
- (3) Meningkatkan rasa tanggung jawab pemimpin program keluarga harapan.
- (4) Koordinator PKH dan Koordinator Kabupaten PKH untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- (5) Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi keluarga yang ingin memanfaatkan program keluarga.

g. Metode dan Tehnik

Praktikan menggunakan metode community development (CO)/pengembangan organisasi (Community Organization/CD) dalam proses intervensi permasalahan masyarakat. Community Development (CO)/Pengembangan Organisasi (Community Organization/CD) adalah proses menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam komunitas atau bidang kegiatan tertentu. Beberapa teknik yang digunakan oleh praktisi meliputi:

1) Promosi Sosial

Penyuluhan sosial adalah proses perubahan tingkah laku melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan pendidikan kepada kelompok sasaran oleh pendidik sosial secara lisan, tertulis dan dengan demonstrasi, agar memiliki pemahaman, pengetahuan dan kemauan yang sama untuk berpartisipasi aktif membangun kesejahteraan sosial. dan-datang

2) Diskusi Kelompok Fokus atau Focus Group Discussion

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang yang membahas secara mendalam sesuatu yang bersifat tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami masalah tertentu secara lebih rinci. Tujuan dari metode itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi tentang suatu masalah yang bersifat lokal dan spesifik.

3) Pemantauan dan evaluasi

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan. Asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan masyarakat sebagai akibat dari kegiatan yang teridentifikasi. Evaluasi berlangsung selama kegiatan dan pada akhir proyek. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik tentang kebutuhan program yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara program dan tujuan.

h. Rencana Anggaran Biaya

Program Penyuluhan Sosial Dapat terlaksana dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2 2 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	150.000,00	150.000,00
	Layar Proyektor	1	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jumlah I				950.000,00
2.	Honorarium				
	Koordinator Kota PKH Bandung	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
	Pendamping Sosial PKH Kelurahan Cimincrang	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah II				4.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				500.000,00
	Jumlah Keseluruhan				5.450.000,00

i. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strength :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Narasumber yang tepat 2. Kegiatan didukung oleh Pemerintah Daerah 3. KPM terbuka dengan informasi baru 4. KPM mempunyai <i>curiosity</i> yang besar 	<p>Weakness :</p> <p>Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan</p>
<p>Opportunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menambah pengetahuan KPM PKH mengenai pelaksanaan PKH 2. Pihak-pihak yang terkait dapat lebih memahami tugas dan kewajibannya 3. Meningkatkan Kesadaran Bagaimana cara menggunakan dana bantuan dengan sesuai kriteria komponen PKH 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan pengetahuan KPM 3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi sosialisasi dikemas secara menarik dan menggunakan komunikasi dua arah 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan diselingi penggunaan bahasa sunda
<p>Threats :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit menemukan waktu yang tepat 2. Rendahnya minat baca 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sejak jauh hari 2. Membuat pamflet atau poster dengan kalimat sederhana dan desain yang menarik 	<p>Strategi WT :</p> <p>Membuat acara yang efektif dan efisien</p>

Matriks 2 8 Analisis Swot

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Sosialisasi dan Edukasi bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Terlihat bahwa penerima manfaat PKH terbuka terhadap informasi baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemberian sosialisasi yang tepat akan meningkatkan tingkat kehati-hatian KPM PKH dalam pelaksanaannya ke depan.

Kegiatan ini kemudian juga didukung oleh pemerintah kabupaten melalui dinas sosial dan pemerintah desa Lembang. Instansi terkait berperan dalam mengedukasi KPM PKH tentang hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan persoalan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan dana bansos PKH. Terlihat bahwa penerima manfaat PKH terbuka terhadap informasi baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemberian sosialisasi yang tepat akan meningkatkan tingkat kehati-hatian KPM PKH dalam pelaksanaannya ke depan.

Kegiatan ini kemudian juga didukung oleh pemerintah kota melalui dinas sosial dan pemerintah kelurahan Cimincrang. Instansi terkait berperan dalam mengedukasi KPM PKH tentang hak dan kewajibannya. Tujuannya agar kejadian Penyalahgunaan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak terulang lagi.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu, adanya kemungkinan peserta yang merupakan KPM PKH tidak memahami materi yang disampaikan. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Sosialisasi dan Edukasi terkait bantuan PKH layak dilaksanakan.

2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial warga negara, termasuk lanjut usia (lanjut usia). Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk mendukung kesejahteraan lansia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Usia 60 tahun ke atas merupakan usia yang cukup rentan. Oleh karena itu, persoalan yang menjadi perhatian khusus bagi lansia adalah masalah kesehatan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 yaitu salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma. Secara umum PKK merupakan komunitas dalam melakukan gerakan masyarakat yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Misi PKK secara umum yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung (Dahniar, 2014:8). Di Kelurahan Cimincrang terdapat kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK Kelurahan Cimincrang memiliki 4 kelompok kerja. Dalam beberapa kelompok kerja, ada salah satu program yang dikhususkan untuk lansia yaitu posyandu lansia. Menurut data yang ditemukan praktikan di Desa Kelurahan Cimincrang, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia yang terletak di RW 07, memiliki hambatan di dalam pelaksanaannya. Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Posyandu Lansia ini menyebabkan kegiatan lansia tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga praktikan mencari solusi untuk penanganan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut.

2.3.2 Tinjauan Konsep

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan individu dan kelompok untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat,

sehingga dalam hal inilah maka kehidupan masyarakat di wilayah yang bersangkutan bisa bersaing dalam menumbuhkan atau meningkatkan perekonomiannya. Adapun definisi pemberdayaan menurut para ahli, antara lain;

a. Dauly

Menurutnya, pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif.

b. Slamet

Definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

c. Sumodiningrat

Arti *empowerment* atau pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

d. Elizabeth

Pemberdayaan (*empowerment*) pada wanita merupakan upaya yang dilakukan untuk menunjukkan penguatan terhadap segala yang berada dalam ketidakberdayaan sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam mengembangkan semangat kepercayaan yang telah ada.

e) Arundhati Chattopadhyaya

Pemberdayaan adalah hal yang multi-dimensi dan mengacu pada perluasan kebebasan dalam membuat pilihan dan melakukan tindakan di semua bidang (sosial, ekonomi, dan politik) untuk membentuk kehidupan seseorang. Hal itu juga menyiratkan kendali atas sumber daya dan keputusan.

f) Jim Ife

Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main).

Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite. Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural. Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan

Suharto (2005:60) menjelaskan hal yang senada bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan. Menurut pandangannya, pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Sebagai sebuah proses

Artinya disini pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat tak terkecuali masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan.

b) Sebagai tujuan

Pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai tujuan adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang manamenjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik

lagi. Baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri, dan sebagainya.

Fahrudin (2012:96-97) dalam bukunya menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memampukan dan memandirikan masyarakat, yakni sebagai berikut ini:

1) *Enabling*

Pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan atau menciptakan suasana atau iklim yang memberi kesempatan potensi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya upaya pemberdayaan ini, diharapkan dapat mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berkelanjutan untuk dapat mengembangkannya.

2) *Empowering*

Kedua, dengan adanya pemberdayaan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata seperti menyerap berbagai masukan atau input hingga serta membuka akses kepada berbagai peluang yang dapat semakin memberdayakan masyarakat.

3) *Protecting*

Melengkapi dua poin diatas, poin selanjutnya adalah *protecting* atau melindungi yang dimana disini adalah mengembangkan perlindungan untuk masyarakat yang menjadi subjek pengembangan melalui pemberdayaan ini. Sebagai contohnya adalah melindungi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat atau bahkan adanya eksploitasi dari yang kuat pada yang lemah.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni :

1) Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi

kedudukan atau sub ordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.

2) Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.

3) Keswadayaan

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumber daya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

4) Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, *impulsive* atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

4. Konsep tentang lansia

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyebutkan bahwa lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Ada dua jenis lanjut usia yakni:

- a) Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- b) Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998, pemerintah bertugas mengarahkan membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 yaitu salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma. Dalam pelaksanaan kegiatan PKK, ada yang disebut dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yaitu mitra kerja pemerintah dan organisasi/Jembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Dalam PKK, ada yang dinamakan dengan kelompok kerja (POKJA). POKJA terdiri atas:

- a) Kelompok kerja 1 sebagai pengelola program:
 - 1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila
 - 2) Gotong royong
- b) Kelompok kerja 2 sebagai pengelola program:
 - 1) Pendidikan dan keterampilan
 - 2) Pengembangan kehidupan berkoperasi
- c) Kelompok kerja 3 sebagai pengelola program:
 - 1) Pangan
 - 2) Sandang
 - 3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- d) Kelompok kerja 4 sebagai pengelola program:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Kelestarian lingkungan hidup
 - 3) Perencanaan sehat Tugas PKK:
 - 4) Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten;
 - 5) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- 6) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- 7) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- 8) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- 9) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- 10) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- 11) Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- 12) Melaksanakan tertib administrasi; dan
- 13) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

6. Konsep Posyandu Lansia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia menurut Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia oleh Komisi Nasional Lanjut Usia tahun 2010 adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.

Menurut Petunjuk Teknik Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM terintegrasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 Tujuan posyandu lansia secara umum adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia bersifat promotif dan preventif dalam bentuk deteksi dini masalah kesehatan, peningkatan pengetahuan, dan membantu mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan lansia baik fungsi fisik, psikologis dan sosialnya.

7. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Posyandu Lansia diberikan kepada pra lansia dan lansia sebagai berikut:

- (1) Wawancara termasuk anamnesa perilaku berisiko (APR)
- (2) Pemeriksaan tingkat kemandirian, dengan menggunakan instrument penilaian Activity Daily Living (ADL)/Aktivitas Kegiatan Sehari-hari (AKS) (khusus untuk lansia).
- (3) Penilaian risiko jatuh (khusus untuk lansia).
- (4) Pemeriksaan status mental dan emosional, dengan menggunakan instrumen penilaian Geriatric Depression Scale (GDS) (khusus untuk lansia).
- (5) Pemeriksaan status kognitif, dengan menggunakan instrumen penilaian Abbreviated Mental Test (AMT) atau Mini Cog dan Clock Drawing Test (CDT4) (khusus untuk lansia).
- (6) Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan atau panjang depa, dan pengukuran lingkar perut
- (7) Pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter
- (8) Pemeriksaan fisik termasuk deteksi dini adanya anemia, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan sebagainya
- (9) Pemeriksaan laboratorium sederhana (kolesterol dalam darah, gula darah sewaktu dan asam urat). Dilakukan 1-2 kali setahun, kecuali yang mempunyai kelainan.
- (10) Melakukan rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit bilamana ditemukan kelainan.
- (11) Penyuluhan secara berkelompok atau konseling secara perorangan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masing-masing lansia.
- (12) Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas kesehatan bagi lansia yang tidak datang atau belum mau datang, agar tetap/mau berpartisipasi dalam kegiatan posyandu.
- (13) Kegiatan aktivitas fisik/latihan fisik antara lain senam low impact, senam vitalisasi otak lansia, gerak jalan santai dan lain sebagainya untuk meningkatkan kebugaran, serta kegiatan lain dalam rangka mempertahankan dan stimulasi fungsi kognitif
- (14) Kegiatan lain yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat:
 - i. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan sebagai contoh

menu makanan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi lanjut usia, menggunakan bahan makanan lokal yang berasal dari daerah tersebut. PMT lansia sebaiknya berupa makanan pokok berbasis pangan lokal, makanan tinggi serat, rendah lemak (tidak digoreng dan tidak bersantan).

- ii. Kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Misalnya pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan keluarga, penguatan keluarga dalam perawatan jangka panjang bagi lansia, pengembangan keterampilan dan pembuatan kerajinan tangan, rekreasi, dan lain-lain.

8. Sasaran

Sasaran Posyandu Lansia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Sasaran Langsung
 - 1) Pra lanjut usia (usia 45 - 59 tahun)
 - 2) Lanjut usia (usia \geq 60 tahun)
 - 3) Lanjut usia risiko tinggi, yaitu usia \geq 70 tahun atau lansia berusia \geq 60 tahun dengan masalah kesehatan.
- b) Sasaran tidak langsung
 - a. Keluarga dimana lansia berada
 - b. Masyarakat di lingkungan lansia
 - c. Petugas kesehatan yang melayani kesehatan lansia
 - d. Kader kesehatan Posyandu Lansia
 - e. Petugas lain yang menangani Posyandu Lansia
 - f. Pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang peduli terhadap pembinaan kesehatan lansia

9. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari Posyandu Lansia diantaranya:

- a) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- b) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia

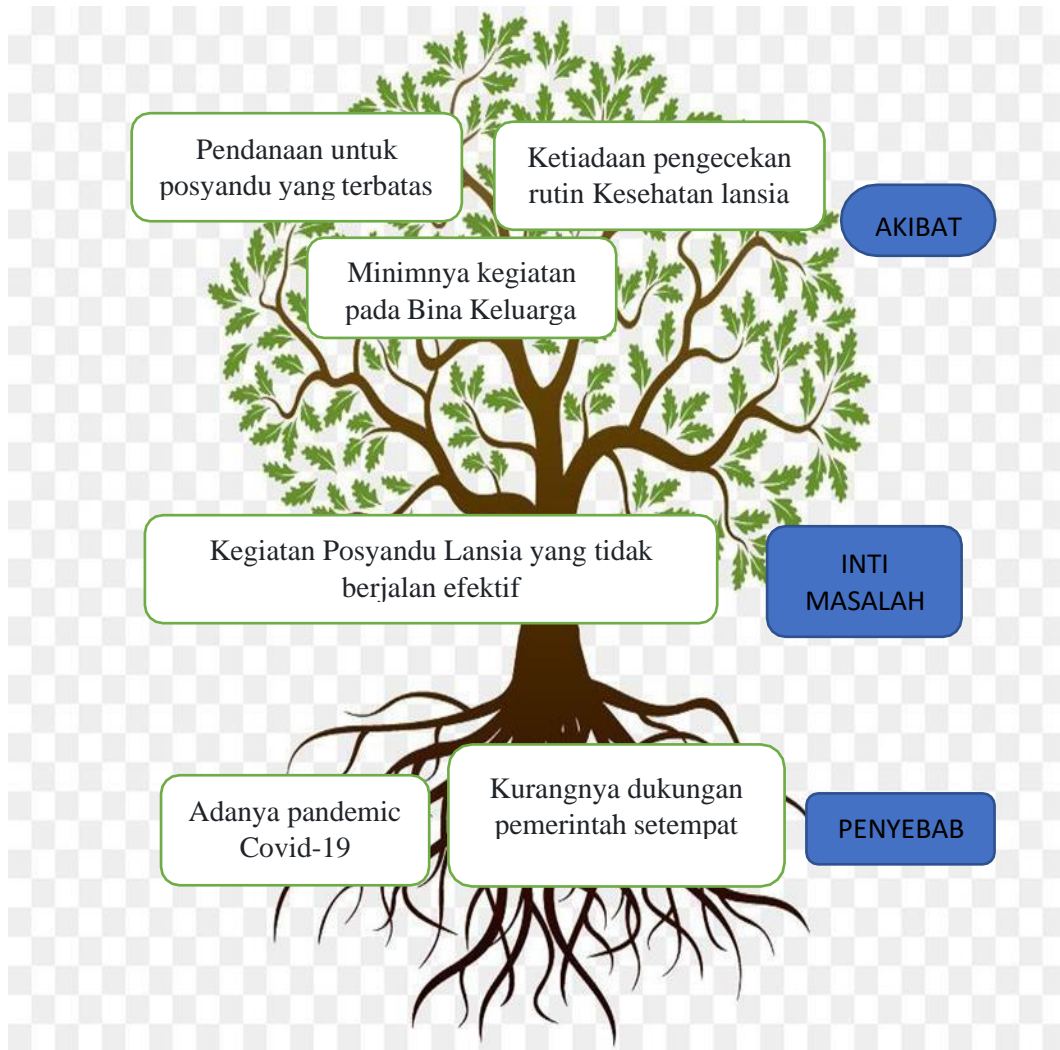
2.3.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang diperlukan guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Melalui tahap asesmen, nantinya praktikan akan mengumpulkan informasi yang dapat menggambarkan situasi secara lengkap dan menyeluruh serta menganalisis risiko, mengumpulkan bukti dari informasi yang tersedia, dan mengarahkan pada pembuatan rencana intervensi.

1. Identifikasi Masalah

Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari Ibu Anih selaku Ketua Bina Keluarga Lansia Posyandu RW 07 Kelurahan Cimincrang, sebelum adanya pandemi Covid 19, pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan secara rutin. Pelaksanaan posyandu lansia dilakukan bersamaan dengan posyandu balita yaitu di hari Sabtu minggu kedua tiap bulan. Peserta yang hadir pada Posyandu Lansia jika dirata-ratakan sekitar 10 orang tiap pertemuan. Hal ini terjadi karena Sebagian lansia yang memiliki keinginan untuk hadir terhalang oleh jarak yang jauh dan tidak ada keluarga yang dapat mengantarkan ke posyandu. Selain itu, kebanyakan lansia akan hadir ketika bidan dapat hadir dalam pertemuan rutin posyandu. Jika tidak, masyarakat enggan hadir dikarenakan pemeriksaan hanya dilakukan oleh kader posyandu. Meskipun demikian, kader posyandu tetap memberikan pelayanan terbaik pada lansia yang memberikan waktunya untuk hadir. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pendanaan untuk mengadakan kegiatan. Dana yang terbatas yang berasal dari swadaya masyarakat, donatur, dan kencelengan digunakan untuk mendukung berjalannya posyandu. Setelah adanya pandemi, kegiatan Posyandu Lansia dihentikan untuk mengurangi risiko terpapar Covid 19. Hal ini menjadikan masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang tidak mendapatkan pengecekan secara rutin di Posyandu. Tidak adanya pengecekan menyebabkan lansia tidak mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya.

Praktikan menyajikan *tools* analisis pohon masalah untuk memudahkan dalam proses asesmen. Silverman dan Silverman (1994) menggunakan istilah pohon masalah untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat dari adanya suatu permasalahan. Adapun rincian dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2 3 Analisis Pohon Masalah

2. Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis pohon masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

a) Adanya pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 menyebabkan segala kegiatan yang diadakan oleh Posyandu Lansia diberhentikan sementara. Pengurus Posyandu Lansia mempertimbangkan hal tersebut dengan alasan kerentanan lansia terhadap paparan Covid 19.

b) Kurangnya dukungan pemerintah setempat

Adanya posyandu awalnya mewajibkan tiap RW memiliki Posyandu Balita dan Lansia. Namun, pendanaan dari pemerintah setempat hanya disediakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Balita. Selama ini, dana yang digunakan dalam pelaksanaan Posyandu Lansia berasal dari swadaya masyarakat, donatur, dan kenclengan (kotak kas) yang bersifat sukarela.

3. Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu diantaranya:

a) Ketiadaan pengecekan rutin kesehatan lansia

Ketika muncul pandemi Covid 19, Pengurus Posyandu Lansia memberhentikan seluruh kegiatan sehingga lansia di RW 07 tidak mendapat pelayanan pengecekan rutin kesehatan.

b) Pendanaan untuk pelaksanaan posyandu lansia yang terbatas

Kurangnya kepedulian pemerintah pada posyandu khususnya pendanaan menyebabkan posyandu lansia hanya memiliki simpanan dana yang terbatas untuk melaksanakan setiap kegiatan dan program yang ada.

c) Minimnya kegiatan pada Bina Keluarga Lansia

Selain dana, posyandu lansia membutuhkan dukungan pemerintah yaitu dengan menghadirkan pengurus PKK dan pihak desa lainnya untuk melihat dan ikut serta dalam Bina Keluarga Lansia. Posyandu Lansia Flamboyan 1 tidak bisa hanya mengandalkan kader-kader posyandu karena pelaksanaan BKL membutuhkan pihak yang memahami lebih dalam mengenai kesehatan lansia seperti, pola makan, gizi yang diperlukan lansia dan penyakit-penyakit yang sering dialami lansia.

4. Fokus masalah

Dari identifikasi permasalahan yang ada, praktikan menemukan bahwa fokus permasalahan yang ada di RW 07 Kelurahan Cimincrang berkaitan dengan Posyandu Lansia yaitu Pelaksanaan Posyandu Lansia yang tidak berjalan secara efektif.

5. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan lansia di wilayah RW 07 Kelurahan Cimincrang sebagai berikut:

- a) Pengaktifan kembali posyandu lansia
- b) Masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang membutuhkan pelayanan kesehatan berupa posyandu yang diadakan rutin seperti sebelumnya.
- c) Adanya dana insentif yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan posyandu lansia.
- d) Bantuan pendanaan dari pemerintah setempat akan mendukung pelaksanaan pelaksanaan Posyandu Lansia dan Bina Keluarga

6. Identifikasi Sumber dan Potensi

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

a) Sumber informal

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang dan masyarakat sekitar.

b) Sumber formal

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Pengurus Bina Keluarga Lansia.

c) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber ini berupa Puskesmas Cempaka Arum sebagai fasilitator dan edukator dalam pelaksanaan posyandu lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang

2.3.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan klien berdasarkan asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, rencana intervensi yang dirancang oleh praktikan adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998, pemerintah bertugas mengarahkan membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia hanya dapat terlaksana apabila pemerintah mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang ditujukan untuk lanjut usia melalui penguatan kapasitas kader Posyandu. Hasil asesmen di RW 07 Kelurahan Cimincrang, praktikan menemukan kegiatan Posyandu yang dikhususkan untuk lansia tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor, diantaranya jarak

tempuh menuju posyandu yang jauh, keterbatasan jumlah tenaga medis, kurangnya dukungan pemerintah desa, serta adanya pandemic Covid-19. Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Posyandu Lansia.

2. Tujuan Umum dan Khusus Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan program yaitu agar kader Posyandu dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan maksimal sehingga masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang mendapatkan haknya sebagai peserta Posyandu Lansia .

a) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program ini yaitu:

- (1) Meningkatkan kesadaran pemerintah setempat terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lansia.
- (2) Meningkatkan pelayanan pemerintah setempat dalam upaya pemberian dana bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat.
- (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah setempat selaku pemangku kepentingan di tingkat masyarakat.

3. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program yang diusulkan oleh praktikan yaitu “PARUDI: Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia” dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Advokasi

Zastrow (1982) mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Kegiatan ini, bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah setempat dalam mengatur pelayanan Posyandu Lansia di Kelurahan Cimincrang.

b) Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi merupakan salah satu bentuk komunikasi di dalam kelompok. Pada diskusi ini diharapkan kader Posyandu, masyarakat lansia serta keluarga lansia menyampaikan apa saja yang menjadi ide, saran, dan masukan untuk perkembangan Posyandu Lansia di masa yang akan datang.

4. Sistem Partisipan

Sistem partisipan menurut Netting (2004) adalah orang yang terlibat atau dilibatkan dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang program. Sistem

partisipan yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

a) Sistem inisiator (Inisiator system)

Sistem inisiator adalah mereka yang pertama kalinya mengenai adanya suatu masalah dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun orang yang mengenali adanya masalah yaitu pekerja sosial.

b) Sistem pelaku perubahan (change agent system)

Sistem pelaku perubahan adalah sekelompok orang bertanggungjawab mengkoordinir program. Adapun sistem pelaku perubahan adalah pekerja sosial.

c) Sistem klien (client system)

Sistem klien merupakan orang yang menjadi penerima manfaat langsung jika program ini terlaksana. Adapun sistem klien pada program ini adalah masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang

d) Sistem pengawasan (controlling system)

Sistem pengawasan terdiri dari seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam memberikan perintah dan menyetujui keputusan pelaksanaan program. Adapun sistem pengawasan dalam program ini adalah Pekerja sosial dan Puskesmas Cempaka arum.

e) Sistem sasaran (target system)

Sistem sasaran dalam program ini adalah Pemerintah Kelurahan Cimincrang

f) Sistem kegiatan (action system)

Sistem kegiatan adalah sejumlah orang maupun lembaga yang melakukan kegiatan bersama-sama dalam upaya pencapaian tujuan upaya pertolongan, maka sistem kegiatan ini adalah pekerja Sosial, Kader Posyandu Lansia, dan Puskesmas Cempaka Arum.

g) Sistem pendukung (support system)

Sistem dukungan yaitu orang atau kelompok yang dapat memberikan andil serta diharapkan dapat terlibat dan mendukung dalam pelaksanaan program

ini. Adapun sistem dukungan dalam program ini adalah Masyarakat RW 07 Kelurahan Cimincrang.

h) Sistem pelaksana (implementing system)

Sistem ini merupakan sekelompok orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program. Adapun sistem pelaksana program ini adalah pekerja sosial dan Kader Posyandu Lansia.

Sistem partisipan dalam pelaksanaan “PARUDI: Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia” yaitu:

Matriks 2 9 Sistem Partisipan Analisis Penataan Lingkungan

No.	Sistem	Partisipan
1.	<i>Inisiator system</i>	Pekerja Sosial
2.	<i>Change agent system</i>	Pekerja sosial
3.	<i>Client system</i>	Kader Posyandu Lansia dan Puskesmas Cempaka Arum
4.	<i>Controlling system</i>	Pekerja Sosial
5.	<i>Target system</i>	Pemerintah Kelurahan Cimincrang
6.	<i>Action system</i>	Pekerja Sosial
7.	<i>Support system</i>	Masyarakat RW 07 Kelurahan Cimincrang dan Puskesmas Cempaka Arum
8.	<i>Implementing system</i>	Pekerja sosial dan Kader Posyandu Lansia

5. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat lansia di RW 07 Kelurahan Cimincrang mendapatkan haknya sebagai peserta Posyandu Lansia.

Teknik yang digunakan yaitu advokasi. Advokasi menurut John Hopkins (1990) merupakan usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi dapat diartikan sebagai salah satu upaya pendekatan terhadap orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Advokasi dilakukan

agar pemerintah Kelurahan Cimincrang memberikan dukungan secara material dan moril dalam pelaksanaan Posyandu Lansia di Kelurahan Cimincrang.

6. Rencana Anggaran dan Alat yang dibutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Ketentuan Honorarium Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2 3 Rencana Anggaran Biaya “PARUDI: Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	50.000	50.000
	Spanduk	1	Lembar	100.000	65.000
	Jumlah I				115.000
2.	Konsumsi				
	Snack peserta	50	Box	50.000	250.000
	Snack panitia	20	Box	50.000	100.000
	Jumlah II				350.000
	Jumlah Keseluruhan				465.000

7. Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

Matriks 2 10 Analisis SWOT Program “PARUDI: Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia”

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
SWOT	Adanya kebutuhan lansia berupa layanan pemeriksaan kesehatan yang harus dipenuhi Dukungan oleh masyarakat setempat berupa partisipasi aktif dalam forum diskusi	Masyarakat yang kesulitan dalam penyampaian aspirasi yang dimiliki
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO	WO
Dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa mengenai pentingnya dukungan pada kegiatan Posyandu Lansia	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah setempat dan instansi terkait	Perwakilan dari pekerja sosial dan pihak kader supaya dapat menyampaikan aspirasi masyarakat
TANTANGAN (THREAT)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan karena waktu dan jarak dari rumah ke lokasi pelaksanaan yang jauh	Memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan advokasi. Memfasilitasi masyarakat yang jauh rumahnya dengan kendaraan	Melakukan evaluasi untuk perbaikan di program selanjutnya.

8. Jadwal dan Langkah-Langkah

Menurut Adi Fahrudin (2010), Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Proses advokasi ini dibagi menjadi beberapa tahap, Adapun rinciannya sebagai berikut:

a) Memilih tujuan advokasi

Masalah yang diadvokasi mungkin sangat kompleks. Oleh sebab itu agar advokasi berhasil maka tujuan advokasi harus dipertajam sedemikian rupa. Tujuan advokasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah Kelurahan Cimincrang dalam pelaksanaan Program Posyandu Lansia.

b) Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi

Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan diadvokasi, mengidentifikasi cara pemecahan bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistis. Data yang valid, lengkap dan akurat juga dapat menjadi argumentasi yang kuat.

c) Mengidentifikasi sasaran advokasi

Jika masalah dan tujuan telah ditetapkan, maka kegiatan advokasi harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan misalnya staf, pimpinan, orang tua, media, dan masyarakat. Sasaran dari program advokasi ini adalah Pemerintah Kelurahan Cimincrang dalam penyediaan dukungan dalam pelaksanaan Posyandu Lansia.

d) Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi.

Pesan mengenai pentingnya program pemberdayaan melalui Posyandu Lansia dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) saat Posyandu Lansia.

e) Membentuk koalisi

Kekuatan advokasi kerap kali ditentukan oleh kuatnya koalisi beberapa orang, organisasi, atau lembaga yang mendukung tujuan advokasi. Bahkan melibatkan banyak orang yang mewakili kepentingan berbeda-beda dapat memberi keuntungan dari sisi keamanan bagi advokasi maupun untuk memperoleh dukungan politik.

f) Membuat presentasi yang persuasif.

Dalam pelaksanaan program, maka pihak yang melakukan advokasi menyampaikan presentasi mengenai informasi mengenai pelaksanaan Posyandu Lansia yang sudah baik.

g) Mengumpulkan dana untuk kegiatan advokasi

Sumber dana dari kegiatan ini adalah dana dari pemerintah Kelurahan Cimincrang.

h) Mengevaluasi usaha advokasi

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik atau masukan untuk memperbaiki strategi dan usaha advokasi

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Hidup

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Undang-Undang 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Secara umum sampah merupakan hasil atau residu dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia terdiri dari sampah organik, sampah non organik, sampah B3 (Bahan berbahaya dan beracun). Pada dasarnya, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari adanya sampah, mulai dari kantong plastik, bungkus makanan dan minuman, sisa makanan, food loss, dan pakaian bekas, semuanya itu adalah bentuk-bentuk sampah yang dihasilkan oleh manusia. Dikaitkan dengan kehidupan modern, adanya penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, maka akan bertambah pula volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam.

Menurut data dari Databoks.co.id, dari 67,8 juta ton sampah di Indonesia pada tahun 2020, 37,3% merupakan sampah organik yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Sampah organik dikenal mampu terurai secara alami, namun sampah organik juga memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Adapun beberapa dampak bahaya sampah organik yaitu, memproduksi gas metana bencana tanah longsor akibat adanya tumpukan organik terjadi di TPA Leuwigajah pada tahun 2005. Ancaman sampah organik tidak berhenti pada gas metana, tumpukan sampah organik yang disukasi oleh hewan-hewan seperti tikus, lalat, dan nyamuk, dapat membawa penyakit melalui virus dan bakteri. Akibat terakhir yaitu memicu pemanasan global. Penumpukan sampah organik mampu melepas gas metana yang berbahaya bagi lapisan ozon. Ketika gas metana yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca menutupi lapisan ozon, maka panas matahari akan terperangkap di Bumi, dan inilah yang menyebabkan suhu Bumi mengalami peningkatan. Dikutip dari Antaranews.com, timbulan sampah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, setiap hari diperkirakan mencapai 1.268 ton namun hanya sekitar 300 ton yang bisa diangkut ke tempat penampungan sampah, sebanyak 968 ton lainnya tidak tertangani menurut data pemerintah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, mengatakan bahwa pengangkutan sampah terkendala oleh keterbatasan armada pengangkut. Selain keterbatasan armada pengangkut, permasalahan lain dialami pula oleh Kelurahan Cimincrang.

Menurut Sekertaris Lurah, Bapak Andri, jarak Tempat Pemrosesan Akhir dari Kelurahan Cimincrang sangat jauh sehingga pemerintah setempat berusaha mencari ide agar pengelolaan sampah dapat dilakukan. Ketika pemerintah setempat melihat fenomena yang ada di masyarakat yaitu adanya penumpukan sampah di tepi jalan maka yang pemerintah setempat memikirkan bahwa hal yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengelola adalah dengan membayar iuran sampah tiap bulan

sebagai biaya ongkos truk dan upah yang akan dibayarkan kepada pihak yang bertugas mengangkut sampah dari Kelurahan Cimincrang ke tempat pembuangan sampah. Selain itu, tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi bobot sampah yang akan diangkut yaitu melalui pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Namun, hanya sedikit masyarakat yang mau membayar iuran sampah dan melakukan pemilahan sampah. Banyak masyarakat yang memilih untuk membuang sampah di kebun, membakar, atau mengubur di dalam tanah. Bahkan ada pula masyarakat yang tidak membayar iuran sampah, diam-diam membuang sampah di tempat yang disediakan untuk pengangkutan oleh petugas. Rendahnya kesadaran masyarakat Kelurahan Cimincrang mengenai sampah dan pengelolaannya menyebabkan permasalahan sampah ini berpotensi memunculkan permasalahan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, praktikan mencari solusi untuk penanganan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut.

2.4.2 Tinjauan Konsep

1. Konsep tentang Penataan Lingkungan

Menurut Rohe (2009), Penataan lingkungan didefinisikan sebagai suatu kegiatan mendesain lingkungan baru atau mendesain pembangunan kembali (revitalisasi) lingkungan yang lama. Sedangkan menurut Checkoway (1985) penataan lingkungan didefinisikan tidak hanya berupa pengembangan fisik tetapi juga pengembangan layanan sosial pada tingkat lingkungan. Penataan lingkungan juga merupakan suatu proses masyarakat mengembangkan rencana, program, atau layanan sosial pada tingkat lingkungan ketetanggan (neighborhood).

Penataan lingkungan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi suatu kota, salah satunya adalah masalah kriminalitas (Rohe, 2009). Pada tingkat yang paling mendasar, penataan lingkungan melibatkan publik, organisasi non profit, dan usaha-usaha pihak swasta dalam perencanaan yang fokus pada karakter fisik satu atau lebih lingkungan, namun itu didefinisikan pada tingkat lokal (Rohe, 2009).

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

2. Komponen Penataan Lingkungan Sosial

Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial maka setidaknya terdapat empat komponen lingkungan sosial yang perlu diperhatikan (Purba, 2002: 21-27). Keempat komponen tersebut ialah:

a) Pengelompokan sosial

Pengelompokan sosial ialah berbagai macam orang yang membentuk

persekutuan atau pengelompokan sosial yang dilandasi hubungan kekerabatan (genealogical based relationship), seperti keluarga inti atau batih, marga atau klen, suku bangsa dan lain-lain.

b) Penataan sosial

Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan itu dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerja sama dan pergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran yang harus dilakukan, dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya.

c) Pranata sosial

Pranata sosial kebanyakan pranata sosial dikembangkan atas dasar kepentingan penguasaan lingkungan permukiman yang amat penting artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Berbagai peraturan dikembangkan untuk menyisihkan orang-orang yang bukan anggota kesatuan sosial yang bersangkutan. Mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas penguasaan sumber daya alam yang tersedia seperti anggotanya.

d) Kebutuhan sosial

Lingkungan sosial itu terbentuk didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi oleh seorang diri, terutama kebutuhan sosial (social needs). Karena itu pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar (basic needs) senantiasa menimbulkan kebutuhan sampingan (drived needs).

3. Konsep tentang Sampah Organik

Menurut data dari website dlh.kulonprogo.go.id, sampah organik adalah sampah dari bahan-bahan hayati yang bisa didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Artinya, sampah organik mudah diurai dengan proses alami. Sampah organik tergolong limbah yang ramah lingkungan sebab bisa diurai secara alami oleh mikroba. Namun, penguraian ini membutuhkan waktu sehingga saat sampah organik tidak diolah dengan cepat dan menumpuk bisa menyebabkan aroma yang tidak sedap. Sampah organik dapat terurai dengan cepat dengan adanya campur tangan manusia. Mengutip dari website Dinas Lingkungan Kabupaten Buleleng, sampah organik dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

- (1) Sampah organik basah. Sampah organik basah merupakan sampah organik yang memiliki kandungan air cukup tinggi. Contoh sampah organik jenis basah yaitu sayur-sayuran, kulit buah, buah busuk, dan sejenisnya. Tingginya kandungan air yang ada dalam sampah inilah yang menyebabkan sampah cepat membusuk.
- (2) Sampah organik kering. Jenis sampah ini merupakan sampah organik yang kandungan airnya sedikit. Contohnya kayu, ranting potongan, daun kering, dan sejenisnya.

4. Pengelolaan Sampah Organik

Sampah organik merupakan jenis sampah yang cukup mudah diolah. Sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang fungsional dan memiliki nilai ekonomis. Adapun cara mengolah sampah organik sebagai berikut.

a) Pupuk Kompos

Pupuk kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti daun kering. Pembuatan kompos ini bisa dilakukan secara alami. Namun saat ada tindakan dari manusia seperti penambahan mikroorganisme pengurai, pengomposan terjadi lebih cepat. Cara membuat kompos sangat mudah dan kandungan haranya juga cukup lengkap sehingga sangat berguna untuk budidaya tanaman.

b) Budidaya BSF (Black Soldier Fly) atau lalat tentara hitam

BSF (*Hermetia Illucens*) adalah sejenis lalat berwarna hitam yang larvanya (maggot) mampu mendegradasi sampah organik. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam (BSF) sangat aktif memakan sampah organik. Proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau, dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas dan ikan. Proses biokonversi dinilai cukup aman bagi kesehatan manusia karena lalat ini bukan termasuk binatang vektor penyakit. Kemampuan BSF mengurai sampah organik tak perlu diragukan lagi. Maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik 2 sampai 5 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Satu kilogram maggot dapat menghabiskan 2 sampai 5 kilogram sampah organik per hari. Maggot yang sudah menjadi prepupa maupun bangkai lalat BSF masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kaya protein. Kepompongnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sehingga dalam proses budidayanya tidak menghasilkan sampah baru. Cara budidaya maggot juga terbilang mudah. Yang dibutuhkan yaitu kandang lalat BSF yang berfungsi sebagai tempat BSF kawin dan memproduksi telur hingga penetasan. Kandang ditutup kawat atau kasa dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Untuk tempat bertelur bagi lalat BSF betina, perlu disiapkan kardus, kayu, atau papan yang memiliki celah. Taruh telur di media penetasan berupa box atau wadah kecil. Telur akan menetas dalam 3-4 hari. Terakhir, siapkan rak atau biopond untuk tempat pembesaran maggot.

c) Pupuk Organik Cair (POC)

Selain diolah menjadi kompos dan biogas, sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Mengutip dari modul “Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Organik”, berikut cara membuat pupuk organik cair.

(1) Bahan dan Alat Pembuatan POC

- (2) Drum 200 liter beserta tutupnya.
- (3) Stop kran diameter 1 – 1,5 inci.
- (4) Sock berderat pipa pralon PVC, ukurannya disesuaikan dengan stop kran.
- (5) Sealent, seal karet ban dalam.
- (6) Plastik yang telah dilubangi sesuai dengan ukuran drum. Sampah organik seperti sisa sayur dan buah.
- (7) EM-4.

Cara Membuat POC

- (1) Pasang pelat plastik yang telah dilubangi ke dalam drum.
- (2) Pasang penahan dibawah pelat plastik untuk menahan sampah yang akan dijadikan pupuk organik cair.
- (3) Buat lubang di samping drum untuk tempat stop kran.
- (4) Pasang stop kran di lubang tersebut lalu lapis dengan karet seal pada bagian luar dan dalam.
- (5) Pada bagian dalam pasang sock pipa plastik dengan stop kran. Lalu kencangkan agar stop kran tidak bocor.
- (6) Setelah alat pembuatan selesai, lanjutkan dengan memasukan seluruh sampah organik yang sudah dicincang ke dalam wadah tersebut.
- (7) Masukkan juga EM-4 sebagai starter.
- (8) Tutup drum dengan rapat.
- (9) Setelah fermentasi selesai, tampung pupuk cair dalam wadah lalu lakukan aerasi agar aroma fermentasi hilang.
- (10) Terakhir, kemas POC dalam wadah tertutup lalu aplikasikan ke tanaman.

d. Biopori

Biopori biasa juga disebut dengan lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan. Pembuatan lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Karena, ketika kita membuat lubang, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memasukkan sampah organik. Selain mengurangi sampah organik yang akan dibuang ke TPA, pembuatan biopori juga akan membuat masyarakat biasa memilah antara sampah organik dan anorganik. Pembuatan biopori dapat dilakukan dengan cara berikut:

Alat dan bahan:

- (1) Bor tanah
- (2) Pipa PVC dan penutup yang sudah dilubangi bagian sisi-sisinya

(3) Sampah organik

(4) Air

Langkah-langkah membuat biopori:

- (1) Sebelum mulai membuat biopori, terlebih dahulu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan.
- (2) Setelah ditentukan tempatnya, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi.
- (3) Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat yang tegak lurus.
- (4) Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10-30 cm.
- (5) Setelah itu, lapisi lubang menggunakan pipa PVC yang ukurannya sama dengan diameter lubang.
- (6) Kemudian, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya.
- (7) Setelah itu tutup lubang menggunakan kawat besi, atau bisa juga memakai tutup pipa PVC yang sudah dilubangi terlebih dahulu.

Perawatan biopori dilakukan dengan cara mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap lima hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. Lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah dapat kita biarkan selama tiga bulan agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Setelah tiga bulan, angkat kompos yang sudah jadi dari lubang biopori, dan lubang siap diisi kembali dengan sampah yang baru. Kompos pun siap digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di halaman rumah.

5. Landasan Hukum tentang Sampah
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 - e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

2.4.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang diperlukan guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Melalui tahap asesmen, nantinya praktikan akan mengumpulkan informasi yang dapat menggambarkan situasi secara lengkap dan menyeluruh serta menganalisis risiko, mengumpulkan bukti dari informasi yang tersedia, dan mengarahkan pada pembuatan rencana intervensi.

1. Identifikasi Masalah

Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari Bapak Andri selaku Sekertaris Lurah Kelurahan Cimincrang, upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengelola sampah sudah ada, yaitu melalui petugas yang mengangkut sampah dari pemukiman menuju TPA. Kegiatan pemilahan sampah dilakukan agar mengurangi tumpukan sampah, memudahkan daur ulang, mencegah polusi udara. Namun, nyatanya hanya sedikit masyarakat yang mau membayar iuran sampah dan melakukan pemilahan sampah. Banyak masyarakat yang memilih untuk membuang sampah di kebun, membakar, atau mengubur di dalam tanah. Bahkan ada pula masyarakat yang tidak membayar iuran sampah, diam-diam membuang sampah di tempat yang disediakan untuk pengangkutan oleh petugas. Rendahnya kesadaran masyarakat Kelurahan Cimincrang mengenai sampah dan pengelolaannya menyebabkan permasalahan sampah ini berpotensi memunculkan permasalahan sosial di kemudian hari.

Praktikan menyajikan tools analisis pohon masalah untuk memudahkan dalam proses asesmen. Silverman dan Silverman (1994) menggunakan istilah pohon masalah untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat dari adanya suatu permasalahan. Adapun rincian dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2 4 Pohon Analis Masalah

a. Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis pohon masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

1) Jarak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terlalu jauh.

Jauhnya jarak yang ditempuh oleh petugas kebersihan untuk mengangkut sampah dari Kelurahan Cimincrang menuju TPA membutuhkan biaya yang banyak khususnya sopir yang mengendarai kendaraan dan bahan bakar minyak yang digunakan truk pengangkut.

2) Tingginya harga lahan untuk membangun Bank Sampah ataupun Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Kelurahan Cimincrang memiliki lahan yang luas untuk digunakan mendirikan bangunan, namun harga yang terlalu tinggi menyebabkan pemerintah setempat tidak dapat membangun Bank Sampah ataupun TPS, sedangkan dana yang dimiliki Pemerintah setempat terbatas.

3) Kebiasaan masyarakat membakar, mengubur, dan membuang sampah di kebun.

Kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cimincrang karena dinilai lebih praktis daripada membayar iuran dan mengumpulkan sampah di satu tempat yang telah ditentukan.

4) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah organik.

Masyarakat Kelurahan Cimincrang banyak yang tidak mengetahui berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dari penumpukan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak aware terhadap aktivitas-aktivitas yang menghasilkan sampah.

b. Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu, diantaranya:

1) Penumpukan sampah di pinggir jalan yang mengganggu pejalan kaki dan aktivitas masyarakat.

Pengelolaan sampah yang tidak baik menciptakan tumpukan sampah di beberapa titik. Hal itu menimbulkan aroma yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak indah dipandang.

2) Timbulnya sarang penyakit

Tumpukan sampah organik yang tidak terurai akan menjadi tempat perkembangbiakan lalat. Seringkali di tumpukan sampah ditemukan belatung (proses metamorfosis dari telur lalat yang telah menetas). Hewan ini akan terus berkembang biak dan membawa virus dan bakteri ke manusia dengan hinggap di makanan.

3) Tercemarnya ekosistem

Dengan kebiasaan masyarakat membakar, mengubur, dan membuang sampah mengakibatkan polusi tanah, udara, serta menurunkan kualitas air di dalam tanah.

4) Sampah organik terbuang sia-sia

Akibat dari tidak adanya pengelolaan sampah organik di Kelurahan Cimincrang, maka limbah yang seharusnya memiliki nilai atau potensi untuk dibuat sebagai produk organik terbuang sia-sia tanpa ada pemanfaatan.

c. Fokus masalah

Dari identifikasi permasalahan yang ada, praktikan menemukan bahwa fokus permasalahan yang ada di Kelurahan Cimincrang berkaitan dengan penataan lingkungan yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah organik.

d. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat di Kelurahan Cimincrang sebagai berikut

1) Pelatihan pengelolaan sampah organik.

Masyarakat Kelurahan Cimincrang membutuhkan pelatihan pengelolaan sampah organik sehingga dapat memilah dan memanfaatkan sampah organik menjadi suatu produk.

2) Sarana Pengelolaan sampah dalam bentuk tempat penampungan sementara.

Adanya tempat penampungan sementara dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk mengumpulkan sampah di satu titik yang telah ditentukan sehingga tidak menciptakan tumpukan sampah yang tidak diinginkan.

3) Pengaktifan kembali bank sampah

Pengaktifan kembali bank sampah yang sebelumnya pernah ada bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk memilah dan menjual sampah yang dimiliki yang kemudian mendapatkan hasil dari penjualan sampah.

e. Identifikasi Sumber dan Potensi

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

1) Sumber informal

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial dan pegiat lingkungan.

2) Sumber formal

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). yang berperan sebagai fasilitator dan edukator bagi masyarakat.

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber ini berupa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai educator dan Pemerintah Kelurahan Cimincrang sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah organik.

2.4.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan klien berdasarkan asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, rencana intervensi yang dirancang oleh praktikan adalah sebagai berikut:

4. Latar belakang

Kelurahan Cimincrang yang berada di kecamatan Gedebage, Kota Bandung, ternyata tentu saja sudah seharusnya kondisi lingkungan diperhatikan oleh pemerintah Kelurahan Cimincrang. Hasil asesmen di Kelurahan Cimincrang, praktikan menemukan bahwa pengelolaan sampah khususnya sampah organik masih belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sampah dan kebiasaan membakar dan mengubur sampah di lahan sekitar rumahnya. Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Cimincrang.

5. Tujuan

a) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program PESANGON Cimincrang : Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi permasalahan sampah organik di Kelurahan Cimincrang.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang yaitu:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pengolahan sampah organik
- (2) Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman

6. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang diusulkan oleh praktikan yaitu PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang. Adapun beberapa kegiatannya sebagai berikut:

a) Pelatihan budidaya maggot BSF

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah organik yang berasal dari rumah tangga melalui budidaya maggot BSF dan praktik pembuatan kandang maggot yang dicontohkan oleh pembudidaya maggot. Diharapkan peserta yang merupakan perwakilan dari tiap RW mampu menjadi pelopor di RW masing-masing.

b) Pelatihan pembuatan biopori

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh peserta pelatihan dengan bimbingan oleh narasumber. Setiap peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator di RW masing-masing.

7. Sistem Partisipan

Sistem partisipan menurut Netting (2004) adalah orang yang terlibat atau dilibatkan dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang program. Sistem partisipan yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

a) Sistem inisiator (*Inisiator system*)

Sistem inisiator adalah mereka yang pertama kalinya mengenai adanya suatu masalah dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun orang yang mengenali adanya masalah yaitu pekerja sosial.

b) Sistem pelaku perubahan (*change agent system*)

Sistem pelaku perubahan adalah sekelompok orang bertanggungjawab mengkoordinir program. Adapun sistem pelaku perubahan adalah pekerja sosial, pemerintah Kelurahan Cimincrang, dan pegiat lingkungan.

c) Sistem klien (*client system*)

Sistem klien merupakan orang yang menjadi penerima manfaat langsung jika program ini terlaksana. Adapun sistem klien pada program ini adalah masyarakat Kelurahan Cimincrang.

d) Sistem pengawasan (*controlling system*)

Sistem pengawasan terdiri dari seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam memberikan perintah dan menyetujui keputusan pelaksanaan program. Adapun sistem pengawasan dalam program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

e) Sistem sasaran (*target system*)

Sistem sasaran dalam program ini adalah masyarakat Kelurahan Cimincrang.

f) Sistem kegiatan (*action system*)

Sistem kegiatan adalah sejumlah orang maupun lembaga yang melakukan kegiatan bersama-sama dalam upaya pencapaian tujuan upaya pertolongan, maka sistem kegiatan ini adalah masyarakat Kelurahan Cimincrang, pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kelurahan Cimincrang, dan Dinas Lingkungan Kota Bandung.

g) Sistem pendukung (support system)

Sistem dukungan yaitu orang atau kelompok yang dapat memberikan andil serta diharapkan dapat terlibat dan mendukung dalam pelaksanaan program ini. Adapun sistem dukungan dalam program ini adalah anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

h) Sistem pelaksana (implementing system)

Sistem ini merupakan sekelompok orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program. Adapun sistem pelaksana program ini adalah masyarakat Kelurahan Cimincrang, pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kelurahan Cimincrang, dan Dinas Lingkungan Kota Bandung.

Sistem partisipan dalam pelaksanaan “PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang” yaitu:

Matriks 2 11 Sistem Partisipan “PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang”

No.	Sistem	Partisipan
1.	Inisiator system	Pekerja Sosial
2.	Change agent system	Pekerja sosial, Pemerintah Kelurahan Cimincrang, pegiat lingkungan
3.	Client system	Masyarakat Kelurahan Cimincrang
4.	Controlling system	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
5.	Target system	Masyarakat Kelurahan Cimincrang.
6.	Action system	Masyarakat Kelurahan Cimincrang, pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kelurahan Cimincrang, dan Dinas Lingkungan Kota Bandung
7.	Support system	Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
8.	Implementing system	Masyarakat Kelurahan Cimincrang, Pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kelurahan Cimincrang, dan Dinas Lingkungan Kota Bandung.

8. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat di Kelurahan

Cimincrang meningkatkan kesadaran dalam pengolahan sampah organik di lingkungan tempat tinggalnya.

Teknik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dengan teknik capacity building. Capacity building merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25). Capacity building dilakukan melalui kegiatan pelatihan budidaya maggot BSF kepada masyarakat Kelurahan Cimincrang.

9. Rencana Anggaran dan Alat yang dibutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Ketentuan Honorarium Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2 4 Rencana Anggaran Biaya “PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang”

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	50.000	50.000
	Spanduk	1	Lembar	100.000	65.000
	Mesin pencacah sampah	1	Unit	7.500.000	7.500.000
	Prototype kendang maggot BSF	1	Paket	500.000	250.000
	Bibit maggot BSF	1	Kilogram	100.000	100.000
	Bor tanah biopori	1	Unit	95.000	95.000
	Pipa PVC	1	Meter	50.000	50.000
	Jumlah I				8.110.000
2.	Honorarium				
	Pembudidaya Maggot BSF	1	Orang/Jam	400.000	400.000
	Jumlah II				400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	60	Box	5.000	300.000
	Snack panitia	15	Box	10.000	150.000
	Jumlah III				450.000
	Jumlah Keseluruhan				8.960.000

10. Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

Matriks 2 12 Analisis SWOT Program “PESANGON Cimincrang: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kelurahan Cimincrang”

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
SWOT	Adanya dukungan dari pemerintah desa berupa pendampingan oleh perwakilan pihak desa dalam program pelatihan pengelolaan sampah.	Masyarakat yang kesulitan dalam pelaksanaan praktik pelatihan.
	Program komprehensif melalui pelatihan pengolahan sampah organik yang dilakukan orang yang ahli di bidangnya	
	Adanya skill yang diterima masyarakat setelah mengikuti pelatihan	
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO	WO
Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengolahan sampah yang baik Program sesuai	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah setempat dan instansi terkait	Pendampingan oleh anggota PKK dalam pelaksanaan praktik pelatihan.
TANTANGAN (THREAT)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan karena tidak tertarik dengan kegiatan.	Menyebarkan pamflet berisi manfaat yang didapatkan apabila memiliki sistem pengelolaan sampah yang optimal.	Melakukan evaluasi untuk perbaikan di program selanjutnya.

11. Jadwal dan Langkah-langkah

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1) Tahap koodinasi

Pada kegiatan koordinasi ini pekerja sosial melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan PKK Kelurahan Cimincrang.

2) Pembentukan kepanitiaan

Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

3) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan.

4) Penentuan peserta

Peserta pada program ini adalah 5 orang perwakilan warga dari tiap RW di Kelurahan Cimincrang.

5) Menentukan jadwal pelaksanaan

Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah pemaparan materi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dengan estimasi waktu 60 menit. Kemudian, setelah kegiatan presentasi dilanjutkan dengan praktik bagi masyarakat dengan estimasi waktu 120 menit.

6) Penyusunan rencana anggaran

Untuk melakukan suatu program maka panitia pelaksana membutuhkan biaya. Rencana anggaran dibuat sesuai dengan seluruh tahapan program. Sumber dana berasal dari dana swadaya yang dikumpulkan oleh setiap RW di Kelurahan Cimincrang dan dana Pemerintah Kelurahan Cimincrang.

7) Menentukan lokasi kegiatan

Panitia pelaksana melaksanakan tugas untuk mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Tempat tersebut harus mudah dijangkau oleh peserta. Lokasi kegiatan dilakukan di salah satu balai warga RW Kelurahan Cimincrang.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelatihan Materi pada kegiatan sosialisasi adalah konsep sampah, teknik pemilahan, dan pemanfaatan sampah melalui budidaya maggot BSF dan pembuatan biopori yang akan disampaikan oleh narasumber dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan pembudidaya maggot BSF. Setelah dilakukan pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembuatan kandang budidaya maggot BSF di lahan yang sudah ditentukan oleh warga dan pembuatan biopori di salah satu rumah warga setempat.

c) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pengakhiran terdiri atas:

1) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program Pengelolaan Sampah Kelurahan Cimincrang.

2) Penyusunan laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Indonesia merupakan daerah rawan bencana karena posisinya yang terletak di tiga lempeng. Banyaknya bencana di Indonesia menyebabkan pentingnya mitigasi bencana, terutama daerah Kota Bandung. Daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana karena berdekatan dengan Sesar Lembang yang langsung berbatasan dengan wilayah pegunungan.

Kelurahan Cimincrang terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Rancasari pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2006 tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Kelurahan Cimincrang terdiri dari 08 RW, dan 30 RT. Kelurahan ini memiliki luas lahan sebesar 161,027 Ha.

Batas Wilayah Kelurahan Cimincrang

Bagian Selatan : Kelurahan Racnanumpang

Bagian Selatan : Kelurahan Mekarmulya

Bagian Timur : Cipadung Kidul Kec. Panyileukan

Bagian Barat : Kelurahan Cisantren Kidul

Praktikan tertarik mengangkat isu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi. Warga Kelurahan Cimincrang dalam menghadapi bencana masih belum paham terkait kesiapsiagaan bencana. Rencana intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Cimincrang dalam menghadapi ancaman gempa bumi yang sering terjadi. Hal tersebut juga dapat mengurangi resiko bencana gempa bumi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat.

2.5.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

1. Konsep Bencana

Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana memiliki sumber atau penyebab, berdasarkan sumber atau penyebabnya, United Nations Development Programme (UNDP) mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

- a) Bencana alam (natural disaster) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/bendabenda angkasa.
- b) Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
- c) Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

2. Konsep Gempa Bumi

Menurut USGS, gempa bumi adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan slip tiba-tiba pada suatu sesar, dan akibatnya getaran tanah dan energi seismik yang terpancar yang disebabkan oleh slip, atau 91 oleh aktivitas vulkanik atau magmatik, atau perubahan tegangan mendadak lainnya di bumi. BNPB Provinsi Nusa Tenggara Barat membagi Gempa bumi terbagi menjadi enam bagian berdasarkan penyebabnya:

- a) Gempa Bumi Runtuhan
Gempa bumi runtuh biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal (skala daerah yang terdampak kecil atau hanya terbatas pada daerah itu saja).
- b) Gempa Bumi Buatan
Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia. Contoh gempa bumi buatan adalah peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi.
- c) Gempa Bumi Vulkanik
Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api mengalami erupsi. Apabila gunung api tersebut semakin aktif, maka semakin tinggi pula timbulnya ledakan yang memicu terjadinya gempa bumi. Namun, gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut.

3. Konsep Manajemen Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas

langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Adapun tahap-tahap manajemen bencana adalah sebagai berikut:

a) Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana di dalamnya terdapat mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, Manajemen risiko bencana biasanya dilakukan sebelum bencana terjadi.

b) Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

c) Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui penyadaran adanya bencana, peningkatan kemampuan menghadapi bencana, dan pembangunan fisik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis kegiatan mitigasi bencana adalah penataan ruang, pengaturan pembangunan, tata bangunan, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

d) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

e) Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan dilakukan saat bencana terjadi dan kegiatan dari manajemen kedaruratan adalah tanggap darurat. Tanggap darurat menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

f) Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan dilakukan saat bencana telah usai dan di dalamnya terdapat pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi berbagai sektor Pemulihan. UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

g) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

h) Rekontruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (UU No. 24 Tahun 2007)

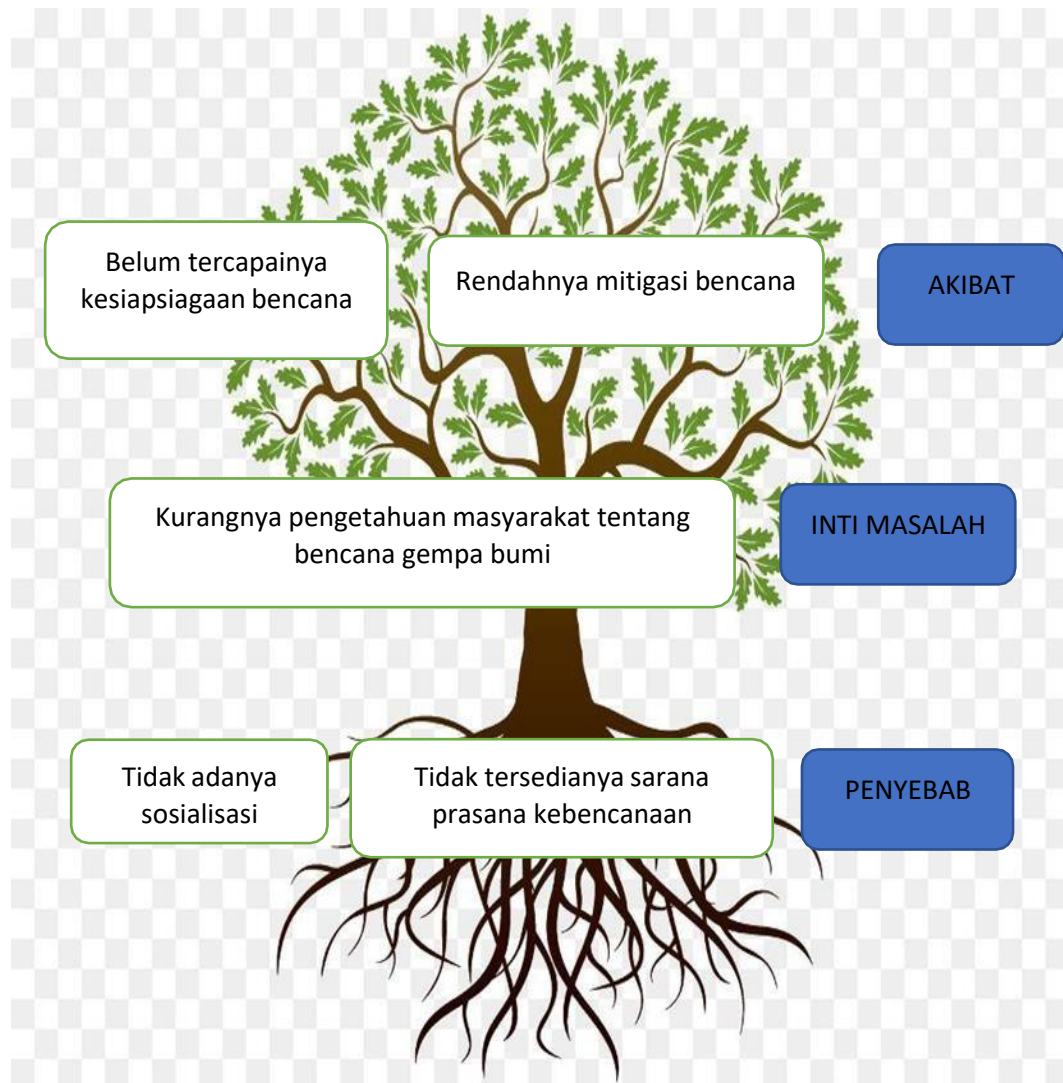
2.5.3 Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu kelima yaitu penanggulangan bencana dilakukan pada tanggal 7-18 April 2022. Praktikan memilih isu terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kelurahan Cimincrang, Kota Bandung dengan menggunakan data sekunder. Teknologi asesmen yang digunakan dengan analisis pohon masalah. Analisa pohon masalah adalah suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisa pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir dengan lebih terstruktur.

1. Identifikasi Masalah

Kecamatan Cimincrang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Bandung dengan wilayah ekologi persawahan. Di bagian Batas Wilayah Kelurahan Cimincrang bagian selatan Kelurahan Racnanumpang, bagian selatan Kelurahan Mekarmulya, bagian timur Cipadung Kidul Kec. Panyileukan bagian barat Kelurahan Cisantren Kidul. Jumlah penduduk di Kelurahan Cimincrang sebanyak 57.429 orang. Dengan luas wilayah 15.615.49 hektar. Didalam komoditas pertanian terdapat padi, ubi kayu, ubi jalar, talas dengan komoditi utama yaitu padi. Kelurahan Cimincrang berbatasan langsung dengan Sesar Lembang sehingga apabila terjadi gempa bumi di wilayah tersebut akan berdampak juga ke wilayah Cimincrang. Sesar Lembang sering mengalami guncangan bencana gempa bumi dikarenakan wilayahnya dekat dengan perairan.

Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah



a) Penyebab Masalah

1) Tidak adanya sosialisasi

Rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Cimincrang tergolong rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

2) Tidak tersedianya sarana dan prasarana

Tidak tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan merupakan factor penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi. Hal ini karna dengan tidak tersedianya sarana dan prasana kebencanaan maka semakin mendorong ketidaktahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi.

b) Dampak Masalah

1) Rendahnya mitigasi bencana

Karna masih belum adanya sosialisasi maka pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana terutama gempa bumi tergolong kurang.

2) Belum tercapainya kesiapsiagaan bencana

Kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat harus diinfokan jauh sebelum tanda-tanda bencana ada. Dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta pelatihan kebencanaan belum di laksanakan secara optimal maka siapsiaga masyarakat kurang.

c) Fokus Masalah

Sebagaimana yang sudah diidentifikasi di atas focus masalah disini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Cimincrang Kota Bandung mengenai bencana gempa bumi

2. Identifikasi Kebutuhan

Masyarakat Kelurahan Cimincrang membutuhkan pengetahuan mengenai bencana lalu pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan sarana prasarana kebencanaan. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan, diharapkan warga menegtahui ancaman-ancaman bencana dan dapat meminimalisir resiko bencana.

3. Identifikasi Potensi dan Sumber

(1) Pemerintah Kelurahan Cimincrang Perlu dilibatkan karna pemerintah Kelurahan merupakan otoritas yang kemudian akan menjalankan program pengurangan resiko bencana di Kelurahan Cimincrang.

(2) BPBD Kota Bandung Merupakan stakeholder utama dalam program pengurangan resiko bencana di wilayah Kota Bandung. Dilibatkan dalam kegiatan perancangan program pengurangan resiko bencana.

(3) Karang Taruna Kelurahan Cimincrang Dilibatkan sebagai partisipan generasi muda.

(4) TAGANA Kota Bandung Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tanggap darurat bencana

2.5.4 Rencana Intervensi

1. Latar Belakang

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU No. 24 Tahun 2007). Bencana alam dapat diprediksi dengan alat-alat pendeteksi bencana untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi saat dan setelah bencana, meskipun teknologi termutakhir belum mampu mendeteksi bencana gempa bumi dan erupsi gunung berapi.

Kelurahan Cimincrang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan wilayah ekologi persawahan. Kelurahan Cimincrang berbatasan langsung dengan Sesar Lembang sehingga apabila terjadi gempa

bumi di wilayah tersebut akan berdampak juga ke wilayah Kelurahan Cimincrang. sering mengalami guncangan bencana gempa bumi dikarenakan wilayahnya dekat dengan perairan atau laut dan pegunungan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pemberian sosialisasi atau penyuluhan terkait kebencanaan di Kelurahan Cimincrang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar siap siaga dalam bencana.

2. Tujuan Umum dan Khusus

a) Tujuan umum

Untuk mencapai kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Cimincrang Kota Bandung dalam menghadapi ancaman gempa bumi.

b) Tujuan khusus

- (1) Merencanakan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi
- (2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi
- (3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi
- (4) Mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan

3. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program yang akan di laksanakan ialah pengurangan resiko bencana gempa bumi di Kelurahan Cimincrang. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu;

- a) Perencanaan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi
- b) Sosialisasi mengenai bencana gempa bumi dan pelatihan mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi

Matriks 2 13 Tabel Rencana Bentuk Kegiatan Program “Ppengurangan resiko bencana gempa bumi di Kelurahan Cimincrang”

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber biaya
Perencanaan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi	Warga Kelurahan Cimincrang	Masyarakat menjadi siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana	TAGANA	Kepala Kelurahan	1 hari	Kelurahan Cimincrang
Sosialisasi terkait bencana gempa bumi dan pelatihan mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi	Warga Kelurahan Cimincrang	Meningkatnya pengetahuan warga Masyarakat Kelurahan Cimincrang terkait gempa bumi dan upaya tanggap darurat	BPBD	Pekerja Sosial	1 hari	Kelurahan Cimincrang

4. Sistem Partisipan

Matriks 2 14 Tabel Sistem Partisipan program, “Pengurangan RisikoBencana Gempa Bumi di Kelurahan Cimincrang”

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	Initiator System	Pekerja Sosial
2	Change Agent System	Pekerja Sosial, BPBD, TAGANA
3	Client System	Warga Kelurahan Cimincrang
4	Support System	Pemdes, warga Kelurahan Cimincrang, Dinas sosial Kota Bandung
5	Controlling System	Pemerintah Kelurahan, BPBD
6	Implementing System	BPBD, Masyarakat, TAGANA, Pemerintah Kelurahan
7	Target System	Warga Kelurahan dan Karang Taruna
8	Action System	BPBD, TAGANA, Pemdes, Masyarakat, Karang taruna

5. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi adalah dengan metode community organization and community

development atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Kemudian diimplementasikan dengan menggunakan strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi tersebut didukung dengan penerapan taktik capacity building. Peningkatan kemampuan (capacity building) yang dapat dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan kemampuan.

5. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Matriks 2 15 Tabel Alat program, “Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kelurahan Cimincrang”

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	2
2	Kursi	40
3	Alat Tulis	4
4	LCD	1
5	Proyektor	1
6	Sound System	1

a) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2 5 Tabel Rencana Anggaran Biaya program “Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kelurahan Cimincrang”

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Logistik					
1	Banner Kegiatan penyuluhan	1	Lembar	70.000,00	70.000,00
2	Sound System	1	Unit	150.000,00	150.000,00
3	ATK	4	Paket	20.000,00	80.000,00
Honorarium					
1	BPBD	1	Orang	500.000,00	500.000,00
2	TAGANA	1	Orang	500.000,00	500.000,00
Konsumsi					
1	Snack Panitia	6	Box	10.000,00	60.000,00
2	Snack Tamu Undangan	6	Box	10.000,00	60.000,00
3	Snack Peserta	45	Box	10.000,00	450.000,00
Jumlah					1.870.000,00

6. Analisis Kelayakan Program

Matriks 2 16 Tabel Analisis SWOT program, “Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kelurahan Cimincrang”

Faktor Internal	Kekuatan (Strength): Perangkat Kelurahan aktif mengingatkan bahaya bencana 1. Adanya narasumber yang kompeten dan ahli di bidang kebencanaan 2. Adanya kemauan dan semangat belajar dari masyarakat Kelurahan Cimincrang	Kelemahan (Weakness): Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kebencanaan dan mitigasi bencana
Faktor Eksternal		
Peluang (Opportunity) 1. Program diangkat berdasarkan isu kebencanaan yang ada di Kelurahan Cimincrang 2. Dukungan dari stakeholder	Strategi SO: Melakukan kerja sama dengan BPBD Kota Bandung, Kelurahan Cimincrang, TAGANA agar kegiatan berjalan lancar	Strategi WO: Semangat belajar masyarakat yang tinggi memudahkan mereka memahami pengetahuan kebencanaan
Ancaman (Threats): Sistem sasaran yang sangat luas	Strategi ST: Melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan oleh system pengontrol	Strategi WT: Pembentukan kelompok didalam masyarakat Kelurahan Cimincrang agar mempermudah penyebaran informasi

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program penyuluhan bencana dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak dibandingkan aspek kelemahan. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program penyuluhan bencana maka disusun indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kesiapan siaga masyarakat Kelurahan Cimincrang
- b) Meningkatnya kemampuan melindungi diri masyarakat saat bencana terjadi
- c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara perlindungan diri saat

terjadi bencana

d) Kerugian harta benda dan korban jiwa berkurang

7. Jadwal dan Langkah-langkah

a) Pra Pelaksanaan

- (1) Membentuk panitia kerja
- (2) Mengidentifikasi sasaran program
- (3) Menyiapkan lokasi pelaksanaan program
- (4) Menentukan narasumber dan materi yang akan disampaikan
- (5) Membuat perizinan untuk pelaksanaan program

b) Pelaksanaan

Matriks 2 17 Tabel Jadwal Pelaksanaan program, "Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kelurahan Cimincrang"

No	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1	07.30-08.00	Persiapan	Divisi Acara	Divisi Acara
2	08.00-08.05	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3	08.05-08.10	Sambutan Kepala Kelurahan Cimincrang	Kepala Kelurahan	Divisi Acara
4	08.10-09.10	Penyuluhan mengenai bencana gempa bumi	BPBD Kota Bandung	Divisi Acara dan Humas
5	09.10-09.25	Sesi Tanya Jawab	BPBD Kota Bandung	Divisi Acara dan Humas
6	09.25-10.25	Sosialisasi dan pelatihan mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi	TAGANA	Divisi Acara dan Humas
7	10.25-10.40	Sesi Tanya Jawab	TAGANA	Divisi Acara dan Humas
8	10.40-10.45	Dokumentasi	Divisi Pubdekdok	Divisi Pubdekdok
9	10.45-10.55	Penutup	MC	Divisi Acara

c) Pasca Pelaksanaan

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
- (2) Menyusun laporan pertanggung jawaban program.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan yaitu sebagai analis jaminan sosial, analis sumber dana bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, analis penataan lingkungan sosial, dan analis penanggulangan bencana. Kegiatan praktikum merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai teori yang telah didapatkan ketika kegiatan belajar mengajar di kelas. Sumber data yang digunakan oleh praktikan dalam pengumpulan data ialah dengan analisis data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Data-data tersebut seperti data tertulis, dokumen, foto, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Isu yang diangkat beserta intervensi yang dilakukan ketika Praktikum Laboratorium yaitu :

- 1) Analis Jaminan sosial, praktikan mengambil isu mengenai penyalahgunaan dana bantuan program indonesia pintar (PIP) oleh penerima manfaat. Permasalahan ini disebabkan karena kebutuhan dasar yang menKelurahank dan kurangnya sosialisasi terkait PIP. Permasalahan ini menyebabkan implementasi Program Indonesia Pintar Sehat tidak maksimal dapat dilihat dari Perlengkapan sekolah yang sudah tidak layak pakai. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program Penyuluhan Sosial Mengenai Penggunaan Dana Bantuan Sosial PIP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan meningkatkan kesadaran tentang penggunaan dana bantuan PIP.
- 2) Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengambil isu mengenai pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman keluarga penerima manfaat mengenai program tersebut. Oleh karena itu dalam upaya pemecahan masalah, praktikan mengusulkan untuk mengadakan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman KPM terkait mekanisme program keluarga harapan.
- 3) Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan mengambil isu pelaksanaan posyandu lansia yang tidak berjalan efektif yang disebabkan karena adanya pandemi covid 19, kurangnya dukungan pemerintah setempat, kurangnya keterampilan stakeholder posyandu dalam melaksanakan posyandu lansia, serta jarak yang ditempuh menuju posyandu cukup jauh. Hal ini mengakibatkan keterbatasan informasi yang diterima lansia dan keluarga mengenai penyakit yang dialami, minimnya kegiatan pada Bina Keluarga Lansia, ketiadaan pengecekan rutin kesehatan lansia, dan pendanaan untuk pelaksanaan posyandu yang terbatas. Oleh karena itu, dalam upaya pemecahan masalah praktikan mengusulkan

program pelaksanaan peningkatan kapasitas kader/stakeholder posyandu, saran penyediaan dana kelurahan/ Kelurahan atau menggali dana lain uang tidak mengikatnya dari sumber lain seperti CSR yang diharapkan mendapatkan hasil yang baik sehingga ada peningkatan pelayanan Posyandu Lansia.

- 4) Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan menemukan isu di Kelurahan Cimincrang mengenai terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah organik. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat untuk membakar, mengubur, dan membuang sampah di kebun, tingginya harga lahan yang akan dipakai untuk TPS/Bank Sampah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, serta faktor jarak lokasi TPA yang cukup jauh. Adapun akibat yang ditimbulkan dari hal yang disebutkan di atas yaitu penumpukan sampah di pinggir jalan, timbulnya bau tidak sedap di sekitar pemukiman, dan sampah organik yang terbuang sia-sia. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu melalui pelatihan maggot BSF dan pembuatan biopori yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah organik dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang mengelolanya.
- 5) Analisis penanggulangan bencana mengangkat isu tentang kurangnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Cimincrang Kota Bandung mengenai bencana gempa bumi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut rencana intervensi yang akan dilakukan ialah "pengurangan resiko bencana gempa bumi di Kelurahan Cimincrang". Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu perencanaan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi dan sosialisasi mengenai bencana gempa bumi serta pelatihan mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi.

B. Saran

Praktikan memberikan beberapa saran dalam pelaksanaan Praktikum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, diantaranya:

- 1) Untuk program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - a) Diharapkan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mempersiapkan pedoman yang tetap sehingga tidak ada perbedaan dalam penulisan laporan akhir praktikum laboratorium.
 - b) Menghadirkan narasumber yang expert di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mengetahui prospek kerja yang dimiliki Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
- 2) Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diharapkan adanya penyediaan akses pada jurnal-jurnal gratis mengenai Pekerjaan Sosial untuk memudahkan pelaksanaan praktikum laboratorium

DAFTAR PUSTAKA

- Jabarprov. (2020). Tingkatkan Kebahagiaan Para Lansia, TP PKK Jabar Perkuat Program BKL
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/39926/2020/11/02/Tingkatkan-Kebahagiaan-Para-Lansia-TP-PKK-Jabar-Perkuat-Program-BKL>
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) & Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2021/3/28/pkk-posyandu>
- Abdalloh, Mildan. (2021). Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Timbang!
<https://www.ayobandung.com/soreang/pr-79726885/penanganan-sampah-di-kabupaten-bandung-timbang> Antara news. (2022). Sampah yang tak tertangani di Kabupaten Bandung capai 968 ton per hari.
<https://www.antaraneews.com/berita/2664521/sampah-yang-tak-tertangani-di-kabupaten-bandung-capai-968-ton-per-hari>
- Gischa, Serafica. (2022). Masalah Sosial di Lingkungan tempat Tinggal.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/18/165321769/masalah-sosial-di-lingkungan-tempat-tinggal?page=all>
- Sustaination. (2021). Bahaya Sampah Organik, Ancaman Besar Bagi Bumi Kita!
<https://sustaination.id/bahaya-sampah-organik/>
- DLH Probolinggo. (2021). Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot di TPA Seboro. <https://dlh.probolinggokab.go.id/pengolahan-sampah-organik-dengan-maggot-di-tpa-seboro/>
- Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.(2018). Cara Membuat Biopori untuk Resapan Air dan Mengatasi Banjir. <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/cara-membuat-biopori/>
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [JDIH BPK RI]. (2022). Retrieved 27 April 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>

Sumber lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Peraturan Menteri Sosial No 10 tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial

UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

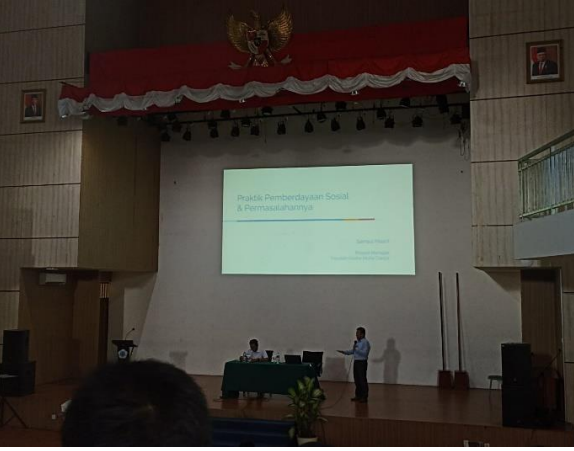
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah


Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah.

Daftar Lampiran Dokumentasi Praktikum Laboratorium

A. Daftar Lampiran Dokumentasi Pembekalan



No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kamis, 02 Februari 2023	Pembekalan Praktikum Analisis Jaminan Sosial, Narasumber Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME	
2.	Rabu, 22 Februari 2023	Pembekalan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial. Narasumber kegiatan yaitu Bapak Tonton Heriyanto sebagai CSR Manager PT. Accor Asia Pacific Corporation Indonesia	 <p style="font-size: small; position: absolute; bottom: 10px; right: 10px;">No. 367 Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat Index number 22 Feb 2023 10:37</p>

3.	Rabu, 8 Maret 2023	Pembekalan Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif selaku Projek Manajer Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur	
----	-----------------------	--	--

4.	Kamis, 23 Maret 2023	Pembekalan Analisis Penata Lingkungan Sosial oleh Ade Reno, AKS, MSW selaku Deputi 1 CEO, Islamic Relief Indonesia	
----	-------------------------------	--	---

5.	Rabu, 5 April 2023	Pembekalan Analisis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta	
----	--------------------------	---	--

B. Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan

1.	Jumat, 10 Februari 2023	Kegiatan Wawancara KPM PIP & PKH didampingi oleh pendamping PKH Kelurahan Cimincrang Bu Catrin	
2.	Jumat, 17 Februari 2023	Kegiatan rutin kerja bakti di area sekitar Mesjid Al-Jabbar	

C. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Dokumentasi
1.	Jumat, 27 Februari 2023	08.00-09.00 WIB	
2.	Jumat, 03 Februari 2023	15.00-16.00 WIB	

3.	Senin, 27 Maret 2023	07.30- 08.30 WIB	
----	-------------------------	---------------------	--